



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029

**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKALIS**

Bengkalis
University Of Culture



**pesona
indonesia**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan rasa syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmatnya sehingga tersusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029.

Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Secara umum RENSTRA Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan dinas dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yang terkait dengan APBD yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Secara rinci RENSTRA Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 berisi informasi kemajuan yang telah dicapai, masalah serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada masing masing bidang urusan di lingkungan dinas. Dari telaahan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang ingin dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan dalam kurun waktu 2025-2029. Dengan arah kebijakan pada masing masing bidang, yang meliputi Bidang Pariwisata, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan dan Bidang Olahraga, selanjutnya disusun program program pembangunan, dan berbagai kegiatan dengan indikatif pendanaan.

RENSTRA Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 juga dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh unit di lingkungan dinas untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2025-2029 yang secara substansi sejalan dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

Bengkalis, 30 Desember 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN BENGKALIS



EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

NP. 19660514 198811 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Umum Pelayanan	8
2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3.1 Sumber Daya Manusia	20
2.3.2 Sarana dan prasarana	24
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.4.1 Capaian Kinerja Pelayanan	33
2.4.2 Kelompok Sasaran Layanan	37
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	57
4.2 Kelompok Sasaran	96
BAB V PENUTUP	122
5.1 Kesimpulan	122

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2021 – 2024	8
Tabel 2.2 Komposisi PNS Menurut Jenis Kelamin	21
Tabel 2.3 Komposisi PNS Menurut Golongan Kepegawaian.....	21
Tabel 2.4 Komposisi PNS Menurut Pendidikan.....	22
Tabel 2.5 Komposisi PNS Menurut Peta Jabatan	23
Tabel 2.6 Komposisi PNS Menurut Kelompok Umur.....	24
Tabel 2.7 Daftar Aset.....	25
Tabel 2.8 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkulu 2024.....	33
Tabel 2.9 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Bengkulu	34
Tabel 2.10 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	43
Tabel 2.11 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi.....	46
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu 2025-2029	52
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Tahun 2025-2030	54
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	55
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	56
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	69
Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	97
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	116
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	120
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	19
Gambar 2.2 Bagan Struktural UPT Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	20
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	49
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	50
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang urusan perencanaan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen terus menerus melakukan perubahan paradigma dalam meningkatkan perencanaan daerah. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah merupakan tuntutan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan. Hal ini penting karena perencanaan daerah yang berkualitas merupakan salah satu komponen untuk menghasilkan kualitas pembangunan daerah yang terintegrasi, baik dengan Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Pusat sekaligus sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan otonomi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk : (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk minimalis resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis harus memiliki keterkaitan dengan perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 karena RPJMD

merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja Tahunan Perangkat Daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis adalah : (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi : (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir dan (6) penetapan.

Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 karena RPJMD merupakan terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi perencanaan dan anggaran daerah dalam lima tahun ke depan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis karena melalui proyeksi kinerja perencanaan daerah tersebut tertuang tantangan pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2025 – 2029 . Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam rangka mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis **"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia"**.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tahun 2025 – 2029 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan bidang

Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2029 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang.

Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat. Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Bengkalis dan stakeholder lainnya yang ada di Bengkalis.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2025 – 2029, sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
25. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029 dimaksud sebagai penjabaran RPJMD 2025 – 2029 untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis di daerah;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat :

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan

- c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat :

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Umum Pelayanan

Secara garis besar, Pelayanan Perangkat Daerah adalah ujung tombak pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi. Di Indonesia, hal ini diatur dalam koridor reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Terkait dengan keberhasilan pencapaian target – target Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Basis	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun				Capaian Real				Target Akhir
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Peningkatan PAD sektor pariwisata	5,18	5,14	5,16	5,20	5,21	4,67	5,89	3,26	5,58	90,86	114,15	112,69	112,48	6,50	
2	Peningkatan pertumbuhan ekonomi kreatif	1,45	1,52	1,54	1,56	1,60	1,26	1,26	1,26	2,50	82,89	81,82	80,77	156,25	3,50	
3	Peningkatan prestasi wapres budaya	40	40	40	40	40	60	60	60	60	75,00	75,00	76,47	76,47	70	
4	Peningkatan kapasitas kepemudaan	1	1	1	1	1	0,15	2,15	0,15	0,15	15,00	15,00	15,00	15,00	1	
5	Peningkatan kapasitas kesetaraan	40	40	40	40	40	70	70	70	70	82,35	82,35	82,35	82,35	90	
6	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	70	71	72	74	75	70,25	72,50	74,75	74,75	98,96	100,69	101,01	99,67	77	

Informasi kinerja anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 antara lain :

1. Rata – rata kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2024, masih dikategorikan baik.
2. Realisasi capaian kinerja indikator untuk bidang pariwisata sangat baik, dikarenakan dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun indikator untuk bidang kepemudaan realisasinya masih jauh dari yang diharapkan karena beberapa faktor kendala.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran, *outcome* program, maupun *output* kegiatan serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan anggaran.

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; dan
- f. Pelaksanaan administrasi dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 3

1. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. Bidang Pariwisata;
 - c. Bidang Kebudayaan;
 - d. Bidang Kepemudaan;
 - e. Bidang Olahraga;

- f. Kelompok JF
 - g. UPTD
2. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
 3. Bagian Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat bertugas melakukan pelayanan Administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana strategis, rencana kerja perangkat daerah, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja dan laporan kinerja pemerintah pada dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
 - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kinerja perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum
 - c. Penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas yang terkait Sekretariat, Sekretaris dibantu oleh kelompok JF.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 7

- (1) Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - e. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
 - f. Meneliti usuan permintaan formasi pegawai lingkup dinas dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;
 - g. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
 - h. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;
 - i. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tata laksanaan serta hubungan masyarakat;

- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang Langkah-langkah atau Tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- k. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa jabatan Analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, dan rencana kerja reformasi birokrasi;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundangan-Undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan Sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan serta menyiapkan bahan-bahan rangka pemecahan masalah;
 - e. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara Pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;

- f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja Bendahara Pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- g. Menghimpun dan mempersilakan bahandan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
- h. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat kartu inventaris barang (KIB) dan membuat kartu inventaris Ruangan (KIR);
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif pegawai negeri sipil, melakukan pengusulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
- j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan asset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggung jawaban; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pariwisata
Pasal 9

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pariwisata sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis kewenangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan dan pengendalian di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah;

- c. Penyusunan tata ruang Kawasan strategis pariwisata;
 - d. Pelaksanaan promosi objek wisata dan produk ekonomi kreatif baik di dalam maupun luar negeri;
 - e. Penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. Penyelenggaraan dan pengawasan standar minimal dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi terkait dengan pariwisata, Kepala Bidang Pariwisata dibantu oleh kelompok JF.

Bagian Keempat
Bidang Kebudayaan
Pasal 10

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas memimpin merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang kebudayaan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan teknis kewenangan di bidang Kebudayaan;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan dan pengendalian di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. Pelaksanaan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang berskala kabupaten; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi terkait dengan Kebudayaan, Kepala Bidang Kebudayaan dibantu oleh kelompok JF.

Bagian Kelima
Bidang Kepemudaan
Pasal 11

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang kepemudaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi kelembagaan, produktifitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, Lembaga-lembaga masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengurusan serta pengendalian program pendayagunaan dibidang Kepemudaan;
 - d. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana kepemudaan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan kepemudaan, Kepala Bidang kepemudaan dibantu oleh kelompok JF.

Bagian Keenam
Bidang Olahraga
Pasal 12

- (1) Bidang olahraga mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang olahraga sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Olahraga Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi penyelenggaraan permasalahan pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olahraga serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, Lembaga-lembaga masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengurusan serta pengendalian program pendayagunaan di bidang olahraga;

- d. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana olahraga; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan fungsi terkait dengan olahraga, Kepala Bidang Olahraga dibantu oleh Kelompok JF.

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan Bertanggung Jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Fungsional Melaksanakan Tugas kedinasan lainnya sesuai dengan penugasan.
- (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta Jabatan berdasarkan Analisis tugas dan fungsi unit kerja, Analisis Jabatan, dan Analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Jenis, Jenjang dan Pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan JF dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Kelompok JF melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melaksanakan tugas sebagai subkoordinator sebagaimana terlampir dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola Konsultatif dan Koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja yang Sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, agar terhindar dari tumpang tindih dan Duplikasi Program Kegiatan secara Substansi dan menjamin Keselarasan Program dan Kegiatan.
- (5) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan Koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris daerah sesuai Pembidangannya.
- (6) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam Melaksanakan tugas dan fungsi serta Pertanggung Jawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (7) Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b). Pejabat Administrator (eselon III. a dan III. b). Pejabat Pengawas (eselon IV.a). Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (8) Pimpinan satuan Organisasi memberikan penugasan kepada Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (9) Jabatan Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (10) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dapat dibentuk UPTD
- (11) Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menerapkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) UPTD adalah Unit yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dan Wilayah Kabupaten Bengkalis.
- (3) UPTD dipimpin oleh Seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas dan secara Operasional Berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

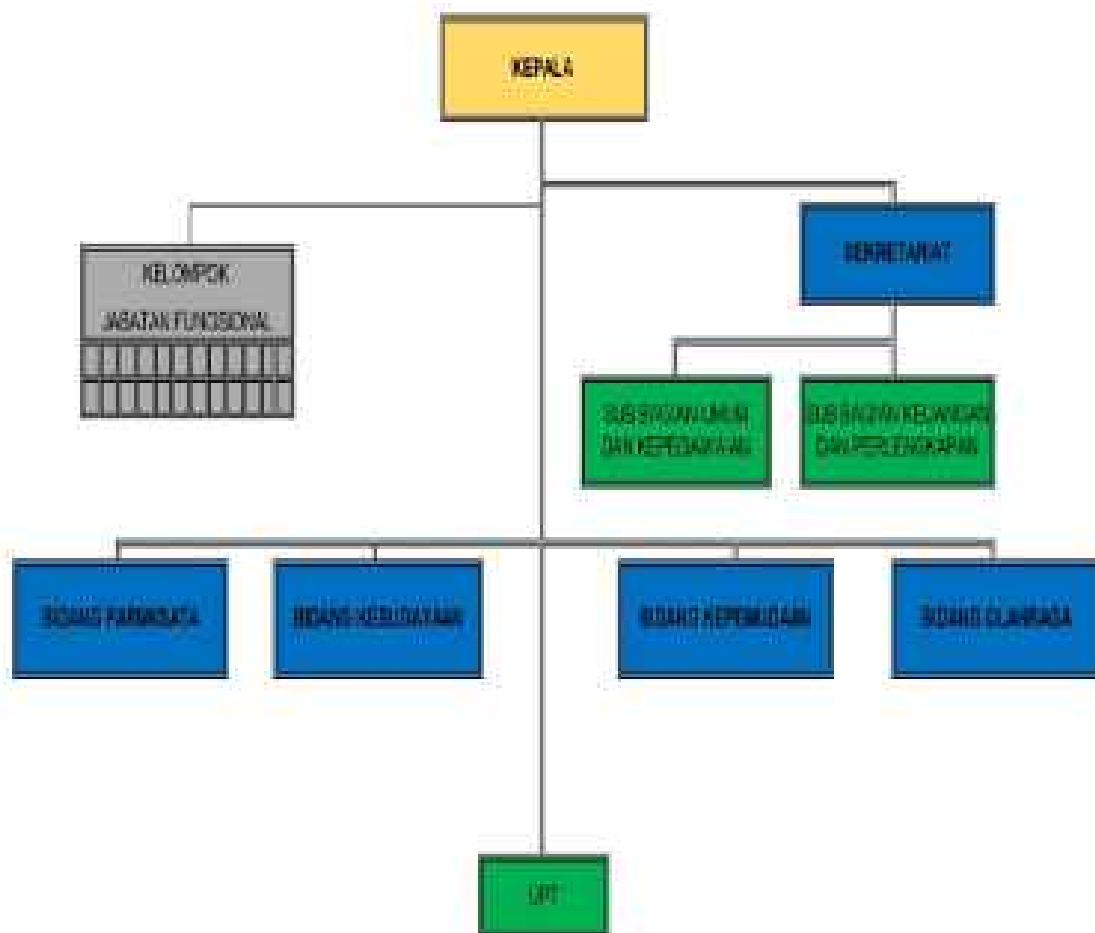
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.1

Gambar Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 43 TAHUN 2024
 TANGGAL : 17 September 2024

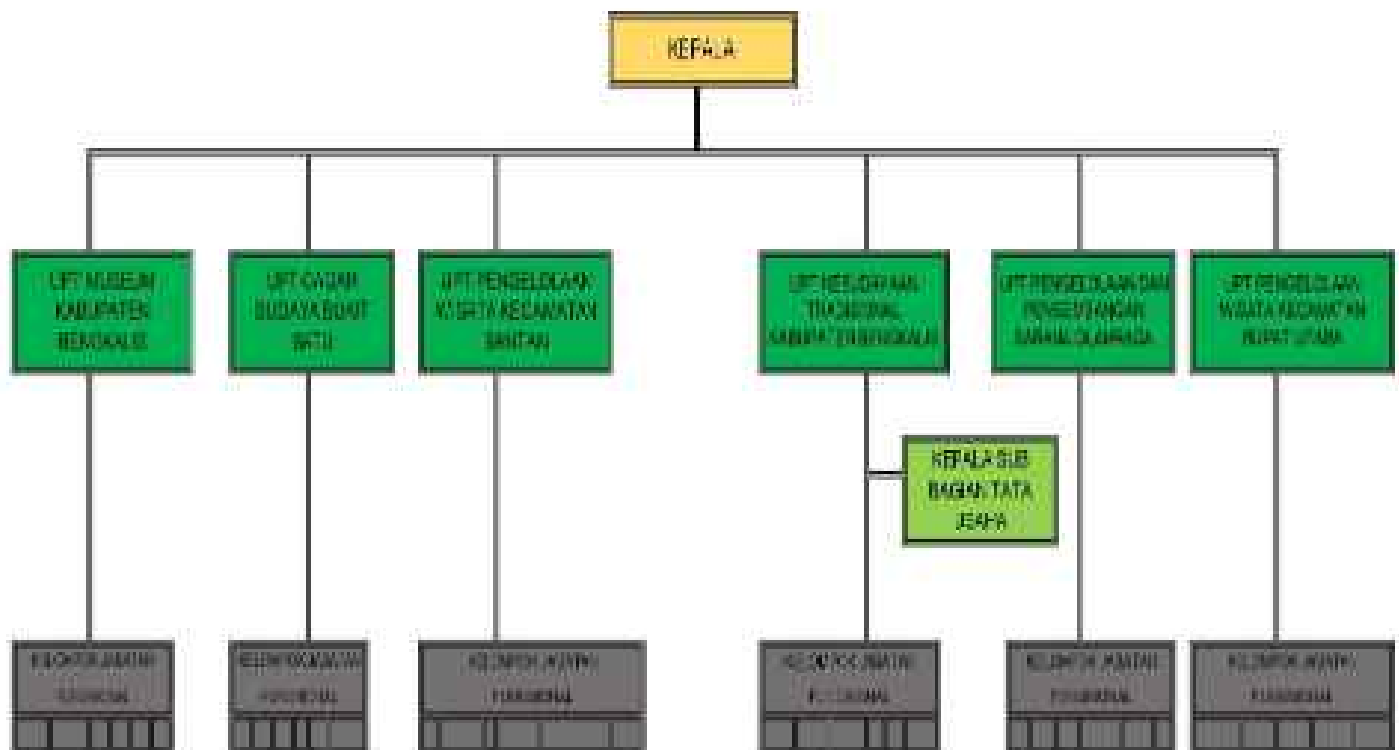
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN BENGKALIS



Gambar 2.2
Bagan Struktural UPT Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 29 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 Mei 2017

BAGAN STRUKTUR UPT PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BENGKALIS



2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.3.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Agustus 2025, jumlah pegawai pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sebanyak 58 orang PNS. Apabila di rinci menurut jenis kelamin, golongan kepegawaian, pendidikan, peta jabatan dan menurut kelompok umur, PNS pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi PNS Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bengkalis menurut Jenis Kelamin

No.	Jabatan/Eselon/tinggi	Unit		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi / Eselon II	1	0	1
2	Jabatan Administrator / Eselon III	3	2	5
3	Jabatan Pengawas / Eselon IV	4	5	9
4	Jabatan Fungsional Tertentu	4	3	7
5	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana (staf)	13	23	36
TOTAL				58

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa 58 orang PNS di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Sebanyak 51 orang PNS bekerja pada kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dan sisanya sebanyak 7 orang PNS merupakan pegawai UPT yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.3
Komposisi PNS Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bengkalis menurut Golongan Kepegawaian

No.	Unit/Bagian	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		1	12	2	15
2	Bidang Pariwisata		3	5	1	9
3	bidang Kebudayaan		2	4	1	7
4	bidang Kepemudaan		4	3	1	8
5	bidang Olahraga		5	0		5
6*	UPT Museum Kabupaten Bengkalis			1		1
7*	UPT Cagar Budaya Muara Batu			1		1
8*	UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan Maran			1		1
9*	UPT Kebudayaan Tradisional Kabupaten Bengkalis			2		2
10*	UPT Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Olahraga			1		1
11*	UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan Rupa Utau				1	1
TOTAL						58

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan II dan III. Sedangkan Golongan IV hanya sejumlah 12 orang. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi

dilaksanakan oleh Pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.4
Komposisi PNS Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bengkalis menurut Pendidikan

No	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	5		7	3	15
2	Bidang Pariwisata	5		8		13
3	Bidang Kebudayaan	3	1	1	1	6
4	Bidang Kepemudaan	5		3	1	9
5	Bidang Olahraga	5		2	1	11
6*	UPT Museum Kabupaten Bengkalis			1		1
7*	UPT Cagar Budaya Bukit Batu			1		1
8*	UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan Bantan				1	1
9*	UPT Kebudayaan Tradisional Kabupaten Bengkalis			2		2
10*	UPT Pengelolaan dan Pengembangan Barana Olahraga		1			1
11*	UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan Rupat Utara			1		1
TOTAL		25	2	24	7	58

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis di dominasi dengan tingkat Sarjana (S1) yaitu sejumlah 24 orang, disusul kemudian tingkat pendidikan SMA sejumlah 25 orang, pendidikan Diploma sebanyak 2 orang, sedangkan tingkat pendidikan Magister (S2) hanya 7 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan pendidikan formal maupun non formal guna meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.5
Komposisi PNS Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bengkalis menurut Peta Jabatan

No.	Jabatan/Jenis Jabatan	Jenis Jabatan											Jumlah
		Jabatan	Bidang Umum	Bidang Kebudayaan	Bidang Pemuda dan Olahraga	Bidang Olahraga	JPT Bekerja sebagai PNS	JPT Sagar Bekerja sebagai PNS	JPT Pengabdian Masyarakat sebagai PNS	JPT Keahlian Teknis sebagai PNS	JPT Pengembangan sebagai PNS	JPT Pengabdian Masyarakat sebagai PNS	
1	Jabatan Kepala Bidang I	1											1
2	Jabatan Kepala Bidang II	1	1	1	1	1							5
3	Jabatan Kepala Bidang III	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	10
4	Jabatan Kepala Bidang IV	1	1	1	1	1			1				7
5	Jabatan Kepala Bidang V	11	1	1	1	1				1			16
Jumlah													36

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan peta jabatan PNS di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis masih di dominasi oleh jabatan fungsional umum atau pelaksana sebanyak 36 orang PNS. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk mengarahkan para ASN nya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional teknis sebagai dasar peningkatan kompetensi jabatan di bidang teknis / teknis lainnya.

Tabel 2.6
Komposisi PNS Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bengkalis menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50		
1	Sekretariat		2	1	8	2	4	18	
2	Bidang Pariwisata			2	2	4	1	9	
3	Bidang Kebudayaan				2	2	1	5	
4	Bidang Kepemudaan				1	2	5	8	
5	Bidang Olahraga		1		4	2	4	11	
6*	UPT Museum Kabupaten Bengkalis				1			1	
7*	UPT Cagar Budaya Bukit Sati				1			1	
8*	UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan Bantan				1			1	
9*	UPT Kebudayaan Tradisional Kabupaten Bengkalis			2				2	
10*	UPT Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Olahraga					1		1	
11*	UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan Rapih Uten						1	1	
TOTAL			4	3	19	14	16	56	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis masih di dominasi usia >50 Tahun sebanyak 16 orang, usia 46-50 Tahun sebanyak 14 orang, usia 41-45 Tahun sebanyak 19 orang, usia 36-40 Tahun sebanyak 5 orang, usia 31-35 Tahun sebanyak 4 orang.

2.3.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.7

Daftar Asset yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

No.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	KONDISI			JUMLAH
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	Lemari Kayu	Baik			52
2	Kursi Kantor Besi	Baik			17
3	Meja Kerja kayu	Baik			27
4	Kursi Besi/Kayu	Baik			10
5	Meja 1/2 besi	Baik			78
6	Kursi Putar	Baik			50
7	Meja Komputer	Baik			25
8	A.C. Split	Baik			61
9	P.C Unit	Baik			38
10	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inch)		Sedang		2
11	Digital Video Effect	Baik	Sedang		1
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik			73
13	Kursi Lipat	Baik			1
14	Pick Up		Sedang		1
15	Motorcycle Motor		Sedang		9
16	Generator Sepi (Lab Scale)		Sedang		4
17	House Mattress Matt (Ruang Penitensi/Idat)		Sedang		2
18	Papan Pengumuman	Baik			9
19	Kursi Tandu	Baik			10
20	Kursi Dosa	Baik			0
21	Mesin Pemutihap (Gendak/Gendak Mekanis)		Sedang		3
22	Handy Cam		Sedang		4
23	Coverdym/Kray	Baik			6
24	Lemari Buku untuk Perpustakaan		Sedang		1
25	Lawan Hutan siap untuk jang Dimanasi	Baik			22
26	Duffel Kaca	Baik			2
27	Stasiun Kano			Rusak Berat	1
28	Perabotan Cetak Lainnya			Rusak Berat	1
29	Alat Komunikasi Handi lainnya			Rusak Berat	1
30	Alat Peraga Sekolah Bidang Studi - Ipa Dasar (kelas 6/5)	Baik			2
31	Denda Merah Putih	Baik			1
32	Meja Komputer		Sedang		1
33	Stasiun Wagon		Sedang		5
34	Gembak Dorong			Rusak Berat	2
35	Lemari Penyimpan	Baik			15
36	Mesin Fotocopy 1-ton	Baik			2
37	Lemari kaca	Baik			4
38	Kursi kayu	Baik			60
39	Jam Dekoran	Baik			1
40	Dispenser		Sedang		11
41	Jamboran			Rusak Berat	1
42	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	Baik			1
43	Master Clock (Peralatan Studio Audio)			Rusak Berat	1
44	Telephone (PABX)	Baik			1
45	Overhead Projector	Baik			3
46	Lemari es	Baik			3
47	Alat Pemas	Baik			1
48	Alat Rumah Tangga lainnya		Sedang		20
49	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Baik			4
50	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	Baik			58
51	Rod Broom		Sedang		5
52	Mikroskop dengan Camera			Rusak Berat	1
53	TV Monitor	Baik			1
54	Auto Analyser	Baik			1
55	Druckee	Baik			2

No.	JENIS PRABARANA DAN SARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
56	Laptop	Baik			26
57	Filing cabinet Kayu	Baik			1
58	Meja Tambahan	Baik			1
59	Rum Krgs Pejabat Eselon II	Baik			16
60	Stabilizer	Baik			2
61	Peralatan Umum Lainnya	Baik			2
62	Peralatan Personal Komputer lainnya	Baik			1
63	Mesin Potong Rumput		Sedang		26
64	Loudspeaker	Baik			8
65	Wireles	Baik			1
66	Meja Krgs Pejabat Eselon II	Baik			13
67	Audio Visual	Baik			6
68	Mainframe (Komputer Jaringan)	Baik			2
69	Komputer Jaringan lainnya	Baik			1
70	Jeep			Rusak Berat	1
71	Lemari Kayu		Sedang		53
72	Alat Penghancur Kertas	Baik			6
73	Partisi	Baik			1
74	Televisi	Baik			16
75	Sound System	Baik			7
76	Alat Komunikasi Telephone lainnya (dst)	Baik			1
77	Mast Tower	Baik			1
78	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Baik			1
79	Roda Tiga/Genduk Kayu/Bersudut		Sedang		4
80	Bak Air	Baik			7
81	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)		Sedang		17
82	CCTV Camera Control Television system	Baik			19
83	Tempat Tidur Kayu		Sedang		41
84	Meja Resepsionis	Baik			4
85	Meja Makan Besi	Baik	Sedang		57
86	Camcra Video	Baik			3
87	Alat Peralaga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA lanjutan lainnya (dst)		Sedang		3
88	Alat Peralaga Praktek Sekolah bidang studi smp lainnya (dst)		Sedang		1
89	Hard disk	Baik			2
90	Monitor	Baik			2
91	Pompa Air	Baik			4
92	Rak Kayu	Baik			12
93	Meja Rapat	Baik			3
94	Rum Rapat	Baik			63
95	Compact Disc Player	Baik			1
96	Facsimile			Rusak Berat	1
97	Alat Komunikasi Radio smp lainnya (dst)		Sedang		10
98	Peralatan Permainan lainnya		Sedang		10
99	Peralatan Olahraga lainnya		Sedang		24
100	Air Blower		Sedang		3
101	Sofa		Sedang		7
102	A.C Window		Sedang		21
103	Compact Disc		Sedang		2
104	Minophone Foot Stand	Baik			4
105	Timbangan Berang		Sedang		6
106	Meja Krgs Pegawai Non Struktural		Sedang		19
107	Rum Krgs Pegawai Non Struktural		Sedang		33
108	Microphone/Wireless Mic			Rusak Berat	6
109	Paging Mic		Sedang		2
110	Layar Film/Projector	Baik			1

No.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
111	Rak, Rak Penyimpanan	Baik			1
112	Mimbar/Podium	Baik			1
113	Majlis Kerja Pejabat Eselon II	Baik			7
114	Papan Nama Instansi	Baik			7
115	Pesawat Telephone	Baik			1
116	Kamdu Jalan	Baik			1
117	Microphone Table Stand		Sedang		1
118	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Baik			6
119	Internet	Baik			2
120	Rak Besi		Sedang		2
121	Kasur Spring Bed		Sedang		120
122	Kipas Angin	Baik			57
123	Kamper Gas (Alat Dapur)		Sedang		3
124	Unit Power Supply	Baik			2
125	Antena SHF Portable	Baik			2
126	Router	Baik			2
127	Peralatan Jaringan Lainnya	Baik			6
128	Alat Tennis Meja	Baik			2
129	Tanah Asrama ABT, Kolam Renang, Pandal Tebing & Lapangan Golf	Baik			1
130	Tanah Untuk Stadion Sepakbola, Muhammad Ali Gass Air Putih	Baik			1
131	Tanah LAM Kec. Bantan	Baik			1
132	Tanah bangunan Gedung RHPN	Baik			1
133	Tanah untuk Perkusian Lam Kec. Beoghalis	Baik			1
134	Tanah Kaveling	Baik			2
135	Tanah Kaveling (pembangunan Turap)	Baik			1
136	Tanah Kaveling (Tanah untuk Pasangarahen)	Baik			1
137	Sport Hall (Dor)		Sedang		1
138	Tanah Gedung Lam	Baik			1
139	Tanah Gedung Pemuda	Baik			1
140	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Olahraga)	Baik			1
141	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik			1
142	Tanah bangunan Balai Sidang/Perkemuan	Baik			1
143	Tanah untuk Bangunan Sarana Olahraga Terfutor	Baik			3
144	Tanah untuk Stadion Mini	Baik			1
145	Lapangan Tennis, Volly Ball dan Lainnya	Baik			1
146	Tanah Tendus Bekas Tambang/Galian	Baik			1
147	Tanah Tendus Berpasir/Pasar	Baik			1
148	Tanah Lapangan Tennis	Baik			3
149	Tanah Lapangan Sepak Bola	Baik			1
150	Tanah Lapangan Sepak Bola	Baik			1
151	Stadion Sepak Bola	Baik			1
152	Tanah Lapangan Sepak Takraw	Baik			1
153	Tanah Lapangan Lainnya	Baik			1
154	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Baik			1

No.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
166	Tanah Bangunan Air Lainnya (Air Mancur)	Baik			1
166	Tanah Lapangan Taman Lainnya	Baik			3
167	Tanah untuk Pembangunan Pariwisata Unggulan	Baik			1
168	Tanah Kebun Binatang	Baik			1
169	Tanah Lapangan Taman Lainnya	Baik			1
169	Tanah Objek Wisata Pantai Tanjung Lela	Baik			1
161	Bangunan Gedung Kantor Disparbudpora, Bangunan Gedung Kantor	Baik			1
162	Bangunan Gedung Kantor Perikanan	Baik			1
163	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik			1
164	Seminaris Halaman Gedung	Baik			1
165	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik			2
166	Pembangunan MCK		Sedang		3
167	Pembangunan Toilet di Objek Wisata Pantai Indah Sekelbaru		Sedang		1
168	Bangunan Gedung Tempat Badan Perikanan		Sedang		2
169	Bangunan MCK	Baik			10
170	Bangunan Tempat Badan Lain-lain (dst)	Baik			1
171	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Perikanan	Baik			1
172	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Perikanan	Baik			1
173	Pembangunan Pentas Seni Desa Bala Pangut Kecamatan Pengir	Baik			1
174	Pembangunan Pengung Kesenian Objek Wisata Pantai Prapat Tunggol	Baik			1
175	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Seni Perikanan	Baik			1
176	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-Lain (dst)	Baik			1
177	anuran	Baik			1
178	Sekururan	Baik			1
179	Jungsiran	Baik			1
180	Panggung Pertunjukan	Baik			1
181	Sekururan	Baik			1
182	Ayunan	Baik			1
183	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-Lain (dst)		Sedang		5
184	Pembangunan Angungan Peridopi Pramuka Kawasan Banten	Baik			1
185	Bangunan Tempat Pariwisata	Baik			1

No.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
186	Rangunan Tempat Bereduk	Baik			5
187	Pondok Taman Satwa Selatbaru Kec. Bantan	Baik			1
188	Pondok Objek Wisata Pantai Kec. Nupel Utara	Baik			1
189	MCK Pantai Lavin Kec. Nupel Utara	Baik			1
190	Gedung Olahraga Terlutup Permanen	Baik			1
191	Gedung Olahraga Terlutup Permanen	Baik			1
192	Gedung Olahraga	Baik			1
193	Gedung Olahraga Terlutup Permanen	Baik			1
194	Stadion Mini Kecamatan Mandau	Baik			1
195	Rangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
196	Rangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
197	Gedung Hanger Perahu naga		Sedang		1
198	Gedung Karamba Pampal Klong		Sedang		1
199	Rangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
200	Pembangunan Wall Climbing Koolitar Kec. Honggala		Sedang		1
201	Rangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
202	Pembangunan Lapangan Catur Tradisional Desa Simpang Ayam	Baik			1
203	Rangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
204	Rangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
205	Rangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
206	Rangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
207	Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Wondan	Baik			1
208	Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Ulu Pulu	Baik			1
209	Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Kembung Luar	Baik			1
210	Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Teluk Lantar	Baik			1
211	Rangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
212	Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Jangkung	Baik			1
213	Rangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
214	Rangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
215	Rangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
216	Pembangunan Lapangan Sepak Takraw	Baik			1
217	Rangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
218	Pembangunan Lapangan Takraw Kelurahan Pengaji	Baik			1
219	Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Pandur Jaya	Baik			1
220	Rangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			13

No.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
221	Pembangunan Lapangan Futsal Desa Romah Mahang	Baik			1
222	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik			1
223	Master Plan Dan Center Park	Baik			1
224	Pematangan Areal Pantai Tebing	Baik			1
225	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik			1
226	Gedung Hanger Perahu Naga		Sedang		1
227	Pembangunan Lapangan Volly Kec. Mandau	Baik			1
228	Pembangunan Lapangan Volly Kec. Rupert	Baik			1
229	Pembangunan Lapangan Takraw Kec. Rupert	Baik			1
230	Pembangunan Lapangan Volly Kec. Rupert Utara	Baik			1
231	Pembangunan Lapangan Takraw Kec. Rupert Utara	Baik			1
232	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik			1
233	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik			1
234	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik			1
235	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik			1
236	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik			1
237	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik			1
238	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik			1
239	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Baik			1
240	Gedung Museum - mchAd	Baik			1
241	Bangunan Gedung Museum Permanen	Baik			1
242	Bangunan Gedung Museum Permanen	Baik			1
243	Bangunan Lp Lain-Lain	Baik			1
244	Bangunan untuk Runding	Baik			2
245	Banguna Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik			1
246	Banguna Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik			1
247	Banguna Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik			1
248	Kolam Renang di Bengkulu	Baik			1
249	Water Boom Di Bengkulu	Baik			1
250	Banguna Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik			4
251	Pembangunan Taman di Objek Wisata Pantai Indah Sela(Baru) Kec. Bantan	Baik			1
252	Taman Permanen	Baik			2
253	Pembangunan Pengelola di Objek Wisata Pantai Papat Tunggul	Baik			1

No.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
254	Taman Permainan	Baik			11
255	Pemasangan Paving Blok di Pantai Indah Selatbaru Kec. Bantan	Baik			1
256	Objek Wisata Silet Bumi	Baik			1
257	Pembuatan Pintu Pagar Induk	Baik			1
258	Rangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik			6
259	Lapangan Volly	Baik			51
260	Lapangan Tenis Wisma Daerah Kec. Bengkalis	Baik			1
261	Rangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik			1
262	Mesa/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Baik			1
263	Pembuatan Capura Rupa Ulu	Baik			1
264	Pembangunan Gerbang Zaman Desa Mekong	Baik			6
265	Tugu Pembangunan	Baik			1
266	Tugu Peringatan Lainnya	Baik			1
267	Monumen Tugu dan Air Mancur	Baik			1
268	Rumah Adat	Baik			2
269	Rumah Peringgalan Sejarah	Baik			1
270	Pembangunan Rumah Makam Datar Laksamana Bukit Batu	Baik			1
271	Rumah Peringgalan Sejarah	Baik			1
272	Makam Anak Dara Sembilan Di Rupa Ulu	Baik			1
273	Pembuatan Kijing Makam dan Pagar Piliq Makam	Baik			1
274	Makam Datar Darah Putih Suku Sakai	Baik			5
275	Makam Bersejarah	Baik			1
276	Rangunan Monumen Kijing	Baik			1
277	Rangunan Bersejarah	Baik			1
288	Sepeda motor	Baik			2
289	Gergaji - Chain saw	Baik			4
290	Filing Kabinet Besi	Baik			2
291	CCTV - Camera Control Television System	Baik			15
292	Alat Penghancur Kertas	Baik			4
293	Mesin Pemotong Rumput	Baik			10
294	A.C. Split	Baik			29
295	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Baik			3
296	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Baik			6
297	Kamera Udara	Baik			2
298	Kamera Digital	Baik			2

No.	JENIS PERANGKAT DAERAH	KONDISI		STATUS BERAT	JUMLAH
		BAIK	SEDANG		
800	Radio Trans	Baik			2
801	Radio	Baik			2
803	Motorcycle Wagon	Baik			2
802	Motorcycle Puma	Baik			1
803	LCD Projector/Reflector	Baik			1
804	Motor Mopeds Bayu	Baik			2
805	Motorcycle Honda	Baik			2
806	Motorcycle Honda	Baik			2
807	Motorcycle Honda	Baik			1
808	Motorcycle/Warung	Baik			2
809	Digital LCD Projector Term	Baik			1
810	Motor Mopeds	Baik			2
811	Motorcycle Honda	Baik			1
812	Motorcycle	Baik			1
813	Motorcycle Honda	Baik			2
814	Motorcycle Honda	Baik			2
815	Motorcycle	Baik			2
816	Motorcycle Honda (Pusat)	Baik			2
817	Motorcycle Honda	Baik			2
818	Motorcycle	Baik			1
819	Motorcycle Honda	Baik			2
820	Motorcycle Honda	Baik			1
821	Motorcycle Honda	Baik			20
822	Motorcycle Honda	Baik			1
823	Motorcycle Honda	Baik			2
824	Motorcycle	Baik			2
825	Motorcycle	Baik			2
826	Motorcycle (Honda)	Baik			2
827	Motorcycle	Baik			2
828	Motorcycle	Baik			1
829	Motorcycle	Baik			1
830	Motorcycle	Baik			1
831	Motorcycle	Baik			2
832	Motorcycle	Baik			1
833	Motorcycle	Baik			2
834	Motorcycle	Baik			1
835	Motorcycle	Baik			1
836	Motorcycle	Baik			1
837	Motorcycle	Baik			1
838	Motorcycle	Baik			2
839	Motorcycle	Baik			2
840	Motorcycle	Baik			2
841	Motorcycle	Baik			2
842	Motorcycle	Baik			1
843	Motorcycle	Baik			1
844	Motorcycle	Baik			2
845	Motorcycle	Baik			2
846	Motorcycle	Baik			2

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Aset yang dimiliki Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis masih kondisi Baik, namun ada kondisi sedang serta kondisi rusak berat. Untuk kondisi rusak berat jika anggaran tidak ada kendala lagi kemungkinan akan di anggarkan kembali yang kondisi rusak berat.

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra – PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau

tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program / kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.4.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keaslian, melindungi dan menjaga Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hal ini dikarenakan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya ini memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.8
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Total Benda, Situs & Kawasan yang dimiliki Daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang belum dilestarikan
1	Bengkalis	26	48	22
2	Bukit Batu	6	7	1
3	Bantan	3	11	8
4	Mandau	2	2	-
5	Rupat	1	3	2
6	Rupat Utara	1	1	-
7	Siak Kecil	-	-	-
8	Pinggir	2	2	-
9	Bandar Laksamana	-	-	-
10	Talang Muandau	1	1	-
11	Bathin Solapan	3	3	-
Jumlah		45	78	33

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 sebanyak 45 dari total 78 Benda, Situs dan Kawasan Cagar

Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya ini sudah mencakup 57,69% dari total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.9
Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Bengkalis

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	40	40	40	40	40
2	Jumlah Seluruh Cabang Olahraga yang Terdaftar	40	40	40	40	40
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	100	100	100	100	100

Sementara itu dari segi cakupan pembinaan olah raga di Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun terakhir sudah sangat baik. Sebanyak 40 cabang olah raga yang ada dan terdaftar di Kabupaten Bengkalis sudah berhasil dibina seluruhnya pada setiap tahun dalam periode 2021-2025. Pembinaan cabang olahraga ini dibutuhkan untuk menciptakan generasi muda Kabupaten Bengkalis yang berprestasi baik di tingkat lokal, maupun nasional dan internasional.

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bengkalis dilakukan terhadap aspek/fokus/urusanpenyelenggaraan pemerintahan. Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani pemerintah Kabupaten Bengkalis :

1. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah Sarana Olahraga per Kecamatan mengalami peningkatan hingga mencapai 95 unit pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi masyarakat.

Sementara itu, Jumlah Pemuda Berprestasi mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat 3 pemuda berprestasi, meningkat menjadi 4 orang pada tahun 2021. Namun, jumlah ini menurun menjadi 2 orang pada tahun 2022, kemudian kembali meningkat menjadi 3 orang pada tahun 2023 dan bertahan pada angka yang sama hingga tahun 2024. Selanjutnya Jumlah Prestasi Olahraga menunjukkan hingga tahun 2023, terdapat 24 cabang olahraga yang mencatatkan prestasi, namun pada tahun 2024 jumlah ini mengalami penurunan menjadi 10 cabang. Meskipun demikian, Jumlah Atlet Berprestasi justru mengalami peningkatan, dari 96 atlet pada tahun 2023 menjadi 103 atlet pada tahun 2024, menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam pembinaan atlet di Kabupaten

Bengkalis. Sedangkan Persentase Wirausaha Muda mengalami penurunan dari 0,17 pada tahun 2020 menjadi 0,04 pada tahun 2024, yang dapat menjadi perhatian dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan di kalangan pemuda. Sementara itu, Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif menunjukkan angka yang cukup stabil, dengan capaian sebesar 0,86% selama periode 2020–2024.

2. Urusan Kebudayaan

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan kebudayaan ditentukan oleh beberapa indikator yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya; benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, serta jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pada tahun 2020, penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya berlangsung satu kali. Hal ini disebabkan oleh pandemi yang berdampak pada pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga berbagai perencanaan yang telah disusun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seiring dengan pelonggaran aktivitas dan adaptasi kebiasaan baru, jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan meningkat menjadi tiga kegiatan pada tahun 2021 dan bertambah menjadi lima kegiatan pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, jumlah festival seni dan budaya mengalami sedikit penurunan, masing-masing menjadi empat kegiatan.

Sementara itu, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkalis menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlahnya tercatat sebanyak 24 situs. Kemudian, pada tahun 2023 dan 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi 37 situs. Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya upaya identifikasi, pemeliharaan, serta pengelolaan benda, situs, dan kawasan cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya kepemilikan benda dan situs budaya, jumlahnya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021, total benda dan situs yang dimiliki daerah tercatat sebanyak 26, kemudian meningkat menjadi 42 pada tahun 2022. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024 dengan total 77 benda dan situs yang dimiliki.

3. Urusan Pariwisata

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah jumlah kunjungan wisatawan. Di Kabupaten Bengkalis, jumlah kunjungan wisatawan masih didominasi oleh wisatawan nusantara, yang tercatat sebanyak 235.746 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara masih relatif kecil, yaitu 3.311 jiwa pada tahun yang sama. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata ke depan. Namun, masih terdapat tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas wilayah dan optimalisasi promosi kepada wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus

berupaya meningkatkan infrastruktur serta memperluas promosi pariwisata guna menarik lebih banyak wisatawan.

Selanjutnya pada indikator rata-rata lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Bengkalis tercatat stabil, yaitu selama tiga hari. Durasi kunjungan ini berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran wisatawan selama berada di Kabupaten Bengkalis, yang berkontribusi pada perekonomian daerah. Namun tingkat hunian mengalami penurunan dari 18,85% pada tahun 2020, menjadi 13,25% pada tahun 2024. Sementara itu indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata menunjukkan tren peningkatan dari Rp 4.020,39 juta pada tahun 2020, menjadi Rp. 22.710,85 juta pada tahun 2023 dan sedikit turun menjadi Rp. 21.407,16 juta pada tahun 2024. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata masih belum menggambarkan potensi yang sebenarnya, karena Sebagian pengeluaran wisatawan dilakukan langsung kepada masyarakat sehingga sulit untuk dihitung secara akurat.

Sementara itu, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bengkalis juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan domestik mencapai 235.748 jiwa, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan 35.930 jiwa. Adapun jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung pada tahun 2024 mencapai 3.764 jiwa, menunjukkan adanya potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata di masa mendatang. Meskipun terjadi peningkatan jumlah wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut meliputi aspek aksesibilitas wilayah serta optimalisasi promosi wisata, khususnya untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya dalam meningkatkan infrastruktur serta efektivitas promosi guna mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Bengkalis kedepannya.

2.4.2 Kelompok Sasaran Layanan

Program-program yang tersaji pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis merupakan program prioritas daerah yang tersaji dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program untuk masing-masing program prioritas ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan daerah. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan – kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis khususnya di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis adalah masyarakat dan perangkat daerah yang berkolaborasi dalam penanganan masalah bidang urusan Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Kelompok sasaran perangkat daerah yang dimaksudkan adalah semua sektor yang mendukung tujuan pemerintah daerah yaitu mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkualitas. Adapun kelompok sasaran sesuai urusan yaitu : Urusan Pariwisata, Urusan Budaya, Urusan Pemuda dan Urusan Olahraga.

Kelompok Sasaran yang berkaitan organisasi antara lain :

1. KONI
2. NPCI
3. LAMR
4. PRAMUKA
5. FKP (Forum Kewirausahaan Pemuda)
6. KORMI
7. BCN (*Bengkalis Creative Network*)

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

Dalam menjalankan tugas dan tujuan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, adapun gambaran permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. **Aksesibilitas ke Destinasi Wisata Masih Terbatas.**
Sebagian besar destinasi unggulan seperti Pulau Rupat Utara, Pantai Selat Baru, dan wisata mangrove belum memiliki akses transportasi yang nyaman, terjadwal, dan terintegrasi, sehingga menyulitkan wisatawan untuk berkunjung.
2. **Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pendukung Wisata**
Kondisi fasilitas publik di lokasi wisata seperti jalan, tempat parkir, toilet, tempat ibadah, papan informasi, dan jaringan internet masih minim dan belum memenuhi standar pariwisata.
3. **Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata**
Banyak objek wisata potensial belum dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Pengelolaan masih bersifat sporadic, tanpa perencanaan yang matang dan berorientasi pasar.
4. **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekraf Masih Rendah**
Kurang Pelatihan, sertifikasi dan pendampingan bagi pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif menyebabkan layanan kepada wisatawan belum optimal.
5. **Minimnya Promosi, Branding dan Digitalisasi Pariwisata**
Promosi destinasi dan produk ekonomi kreatif masih terbatas pada kegiatan konvensional. Pemanfaatan media social, platform digital, dan konten kreatif untuk pemasaran masih rendah.
6. **Lemahnya Kalemبagaan dan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan**
Sinergi antar pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, dan media (pentahelix) belum berjalan efektif dalam mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
7. **Kurangnya Dukungan Investasi dan Pembiayaan Sektor Pariwisata dan Ekraf**
Pelaku usaha lokal masih kesulitan memperoleh akses permodalan dan fasilitas investasi. Sementara itu, minat investor luar daerah masih rendah akibat belum jelasnya arah kebijakan dan jaminan infrastruktur.
8. **Produk Ekonomi Kreatif Belum Memiliki Nilai Jual dan Daya Saing Tinggi**
Sebagian besar produk ekonomi kreatif, kuliner khas, kerajinan tangan, dan fesyen, belum memiliki kemasan, desain dan branding yang menarik serta belum mampu

memiliki kemasan, desain dan branding yang menarik serta belum mampu menembus pasar yang lebih luas.

9. Kurangnya Kegiatan Atraksi dan Event yang Berkelanjutan

Agenda festival, lomba, dan kegiatan budaya masih bersifat musiman dan belum terjadwal secara rutin. Hal ini mengurangi daya tarik wisatawan untuk berkunjung kembali.

10. Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Sapta Pesona dan Wisata Berkelanjutan

Sebagian masyarakat di sekitar destinasi belum memahami pentingnya kebersihan, keamanan, dan keramahan terhadap wisatawan. Pengelolaan lingkungan wisata juga belum berorientasi pada prinsip berkelanjutan.

11. Masih kurangnya inventarisasi data objek pemajuan kebudayaan

Masih kurangnya inventarisasi data objek pemajuan kebudayaan merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya perlindungan dan pengembangan warisan budaya, termasuk Kebudayaan Melayu Riau. Inventarisasi adalah proses awal yang krusial untuk mencatat, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan seluruh kekayaan budaya yang dimiliki suatu daerah. Kekurangan dalam aspek ini berdampak langsung pada seluruh tahapan pemajuan kebudayaan berikutnya (pengamanan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan).

12. Masih kurangnya pemeliharaan data objek pemajuan kebudayaan

Kurangnya pemeliharaan data objek pemajuan kebudayaan merujuk pada kondisi di mana upaya pencatatan, pendokumentasian, pemutakhiran, dan pengelolaan informasi terkait Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) belum dilakukan secara optimal, konsisten, dan berkelanjutan. Padahal, data yang baik adalah fondasi untuk menentukan arah kebijakan dan langkah-langkah pelestarian kebudayaan yang efektif.

13. Masih kurangnya pengamanan data objek pemajuan kebudayaan

Kurangnya pengamanan data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) merujuk pada kelemahan dalam upaya perlindungan terhadap data dan informasi kebudayaan nasional, terutama dari risiko klaim pihak asing (perlindungan kekayaan intelektual) dan penyalahgunaan di era digital. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pengamanan adalah salah satu langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan budaya. Fokus utamanya adalah pengenalan dan pengelolaan hak masyarakat Indonesia atas Kekayaan Intelektual (KI) OPK untuk mencegah pihak asing mengklaimnya.

14. Masih kurangnya publikasi data objek pemajuan kebudayaan

Kurangnya publikasi data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah kondisi di mana informasi yang telah diinventarisasi, diamankan, dan dipelihara (sesuai amanat Undang-

Undang No. 5 Tahun 2017) belum disebarluaskan secara optimal kepada publik, baik di dalam maupun luar negeri. Publikasi dalam konteks Pemajuan Kebudayaan bukan hanya sekedar mengumumkan, tetapi merupakan langkah strategis untuk Pengembangan Budaya: Menyediakan basis data bagi peneliti, seniman, dan komunitas untuk mengkaji, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Peningkatan Kesadaran: Menanamkan rasa bangga dan kepemilikan pada masyarakat. Diplomasi Budaya: Memperkenalkan kekayaan budaya nasional ke kancah internasional.

15. **Masih kurangnya penyelenggaraan event kebudayaan**
Kurangnya penyelenggaraan event kebudayaan merujuk pada minimnya frekuensi, skala, dan kualitas kegiatan atau festival yang menampilkan, merayakan, serta memberdayakan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam konteks Pemajuan Kebudayaan, event budaya adalah wujud nyata dari upaya Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan, yang bertujuan menghidupkan ekosistem budaya dan memberikan dampak ekonomi serta sosial.
16. **Masih kurangnya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya**
Kurangnya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Warisan Budaya adalah kelemahan sistematis dalam implementasi tiga pilar utama Pemajuan Kebudayaan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2017. Ketiga pilar ini seharusnya berjalan sinergis (melindungi agar lestari, mengembangkan agar relevan, dan memanfaatkan agar berdaya). Secara umum, masalah ini menunjukkan bahwa ekosistem kebudayaan belum berjalan optimal dan masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kekayaan budaya yang dimiliki bangsa.
17. **Rendahnya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda**
Rendahnya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda merujuk pada minimnya upaya terstruktur dan strategis untuk melibatkan generasi muda (usia 16-30 tahun, sesuai UU Kepemudaan) secara aktif dan bermakna dalam proses Pemajuan Kebudayaan. Pemuda, yang secara strategis merupakan "agen perubahan" dan pewaris budaya, menjadi titik krusial dalam keberlanjutan kebudayaan. Rendahnya ketiga aspek ini menyebabkan pemuda cenderung apatis terhadap isu kebudayaan lokal dan lebih rentan terhadap pengaruh budaya asing yang dominan.
18. **Rendahnya Pemanfaatan Pemuda untuk Pembangunan**
Rendahnya Pemanfaatan Pemuda untuk Pembangunan merujuk pada ketidakmampuan atau kurang optimalnya pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi besar (segi kuantitas dan kualitas) generasi muda sebagai subjek utama dan agen perubahan dalam seluruh aspek pembangunan nasional. Pemuda Indonesia (usia 16-30 tahun) adalah aset strategis yang berada pada puncak Bonus Demografi. Jika

potensi ini tidak dimanfaatkan, alih-alih menjadi berkah, justru berisiko menjadi beban pembangunan.

19. **Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba**

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius yang sering disebut sebagai "darurat narkoba" karena merusak kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mengancam stabilitas sosial, ekonomi, serta keamanan negara. Meskipun survei Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan tren penurunan angka prevalensi pengguna, data Polri sering menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus yang ditangani dan pengungkapan jaringan, yang mengindikasikan bahwa peredaran dan penyalahgunaan masih menjadi masalah besar.

20. **Gangguan kesehatan mental pemuda**

Gangguan kesehatan mental pemuda merujuk pada kondisi psikologis yang memengaruhi pola pikir, suasana hati, dan perilaku individu dalam rentang usia remaja hingga dewasa awal (umumnya 15-24 tahun), yang secara signifikan mengganggu kemampuan mereka berinteraksi, belajar, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Isu ini merupakan krisis serius karena pemuda adalah tulang punggung pembangunan dan penerima manfaat utama dari Bonus Demografi.

21. **Terpaparnya sebagian pemuda pada paham radikalisme dan intoleransi**

Fenomena terpaparnya sebagian pemuda pada paham radikalisme dan intoleransi adalah masalah serius di Indonesia karena mengancam fondasi persatuan, keberagaman, dan ideologi negara (Pancasila). Pemuda menjadi sasaran utama karena berada pada fase pencarian jati diri yang rentan terhadap ideologi ekstrem.

22. **Terbatasnya ruang ekspresi dan kreativitas turut menghambat perkembangan potensi pemuda secara optimal**

Terbatasnya ruang ekspresi dan kreativitas dapat menghambat perkembangan pemuda karena ia membatasi kemampuan pemuda untuk bereksplorasi, menguji ide, dan mengembangkan keterampilan unik yang sangat dibutuhkan di masa depan. Pemuda yang tertekan untuk hanya mengikuti jalur yang telah ditetapkan akan kesulitan menemukan jati diri dan potensi maksimal mereka.

23. **Rendahnya Budaya Olahraga Masyarakat**

Rendahnya budaya olahraga masyarakat merujuk pada minimnya kesadaran, partisipasi, dan kebiasaan rutin masyarakat dalam melakukan aktivitas fisik atau olahraga sebagai bagian integral dari gaya hidup sehari-hari. Hal ini mencerminkan rendahnya tingkat kebugaran jasmani masyarakat secara keseluruhan dan menjadi tantangan besar bagi kualitas sumber daya manusia dan kesehatan publik.

24. **Rendahnya Penghargaan dan Kesejahteraan Atlet**

Atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan masih kurang mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan.

25. Belum standarnya Sarana dan Prasarana Olahraga
sarana dan prasarana olahraga masih terbatas, belum standard dan kurang memadai bagi atlet Disabilitas.
26. Lemahnya Koordinasi Antarpemangku Kepentingan
Koordinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat masih lemah dalam kegiatan penjangkauan / pembinaan atlet usia dini di setiap cabang olahraga.
27. Rendahnya Kemampuan dan Pengetahuan Tenaga Keolahragaan
Tenaga keolahragaan masih kurang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah pesisir pulau Sumatera. Pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan NKRI khususnya pembangunan infrastruktur untuk pulau-pulau terluar merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam rangka kesatuan dan ketahanan Republik Indonesia. Oleh karena itu Kabupaten Bengkalis perlu menyambut isu ini agar pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dapat disinkronisasikan dengan program pembangunan nasional. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur untuk pulau Rupat yang memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan. Sinkronisasi pembangunan tidak hanya dapat dilakukan dengan pemerintah pusat. Pada tingkat yang lebih rendah, Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau untuk pengentasan kemiskinan dapat melakukan sinergi dengan pemerintah Bengkalis hingga saat ini secara berkelanjutan membangun perumahan sederhana dan sehat serta jalan-jalan akses ke daerah-daerah terisolir. Program-program ini dapat dikomunikasikan dan disinkronisasikan dengan program-program dari Provinsi Riau.

Memasyarakatkan Budaya Melayu melalui pendidikan di sekolah-sekolah, publikasi melalui penerbitan buku, media cetak, dan elektronik, penyelenggaraan acara seni dan budaya, dan aplikasi dalam arsitektur gedung dan lingkungan. Penerapan Budaya Melayu di tengah masyarakat harus memperhatikan adat yang bersendikan syara-syara bersendikan Kitabullah di mana Islam menjadi pilar utamanya.

Memasyarakatkan nilai-nilai mulia yang terdapat dalam tunjuk ajar Melayu seperti jujur, amanah, sopan santun, kerja keras, cerdas, dan sifat mulia lainnya ke dalam setiap lapisan kehidupan, baik di masyarakat, pemerintahan, maupun dalam perdagangan dan aktivitas lainnya, sehingga Budaya Melayu tidak hanya terwujud dalam simbol, tapi juga menjadi ruh dan motivasi dalam menjalankan pembangunan. Menghidupkan semua sisi kebudayaan dalam Budaya Melayu termasuk dalam hal etika (perilaku, nilai, dan norma), estetika

Menyediakan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu menjadi hal penting dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan ini. Memajukan dan merangsang program pembinaan keagamaan pada semua lapisan masyarakat, aparatur pemerintah, anak-anak, dan pemuda melalui pengajian, pelatihan, perkemahan anak-anak dan pemuda, bimbingan intensif, dan diskusi sehingga pengetahuan agama dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari menjadi nyata. Mengaplikasikan nilai positif dan mulia dari agama ke dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menjalankan pemerintahan sehingga bisa menjadi tenaga pendorong dan motivasi untuk mensukseskan pembangunan.

Tabel 2.10 Isu Strategis Perangkat Daerah

[illegible]

Isu Strategis pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu, yaitu adalah :

1. Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
Konsep ini merujuk pada upaya sistematis dan terpadu untuk menjadikan perekonomian suatu daerah (kabupaten/kota) menjadi lebih kuat, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global, namun pelaksanaannya harus

memastikan manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (inklusif) dan tidak merusak lingkungan serta dapat bertahan dalam jangka panjang (berkelanjutan).

2. Penguatan kearifan lokal Budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat dan landasan pembangunan daerah

Penguatan kearifan lokal Budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat dan landasan pembangunan daerah adalah strategi yang menempatkan nilai-nilai luhur, norma, dan tradisi masyarakat Melayu sebagai basis filosofis dan praktis dalam seluruh aspek kehidupan dan perencanaan pembangunan di wilayah tersebut.

- a. **Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bengkalis**

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2025-2029 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Bengkalis 2025-2045, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2025-2029. Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 adalah "**Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia**".

Penjelasan Visi Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. **Bermarwah**, Bermakna: Suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.
2. **Maju**, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Semua Kebutuhan Baik Pangan, Sandang, Papan, Pendidikan, Kesehatan dan Pemanfaatan Teknologi, ditandai dengan Tingginya Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Kompetitif serta Masyarakat yang lebih Mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;
3. **Sejahtera**, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar sebagai Wujud dari Pembangunan yang Adil dan Merata dan menyentuh semua Aspek Kehidupan yang ditandai dengan Tingkat Pendapatan yang Cukup, Rendahnya Angka Kemiskinan, Rendahnya Tingkat Kriminal serta Tingkat Kesehatan dan Pendidikan yang sangat baik
4. **Unggul**, Bermakna : Suatu kondisi tercapainya semua indikator pembangunan daerah, baik dari aspek fisik maupun non fisik, berprestasi dan berinovasi serta memiliki

daya saing yang tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan daerah lain.

Misi merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang dinyatakan secara tegas dan jelas sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat demi kemajuan daerah. Atas dasar itu misi Tahun 2025 – 2029 dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.11
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD
Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA	Terwujudnya Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru	Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara	Program Pemasaran Pariwisata Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
			Meningkatnya kualitas kepemudaan daerah	Meningkatnya daya saing pemuda	Jumlah Prestasi Olahraga Indeks Partisipasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, maka yang menjadi penekanan pada Misi ke-1 yakni **"Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing"** dan Misi Ke-2 yaitu **Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.**

Misi ke-1 ini berfokus pada :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); Memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak, retribusi, dan sumber lain yang sah guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
2. untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sehat, pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas SDM sebagai faktor utama dalam membangun ekonomi daerah yang lebih kompetitif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, daerah dapat berkembang secara mandiri dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Misi ke-2 ini berfokus pada :

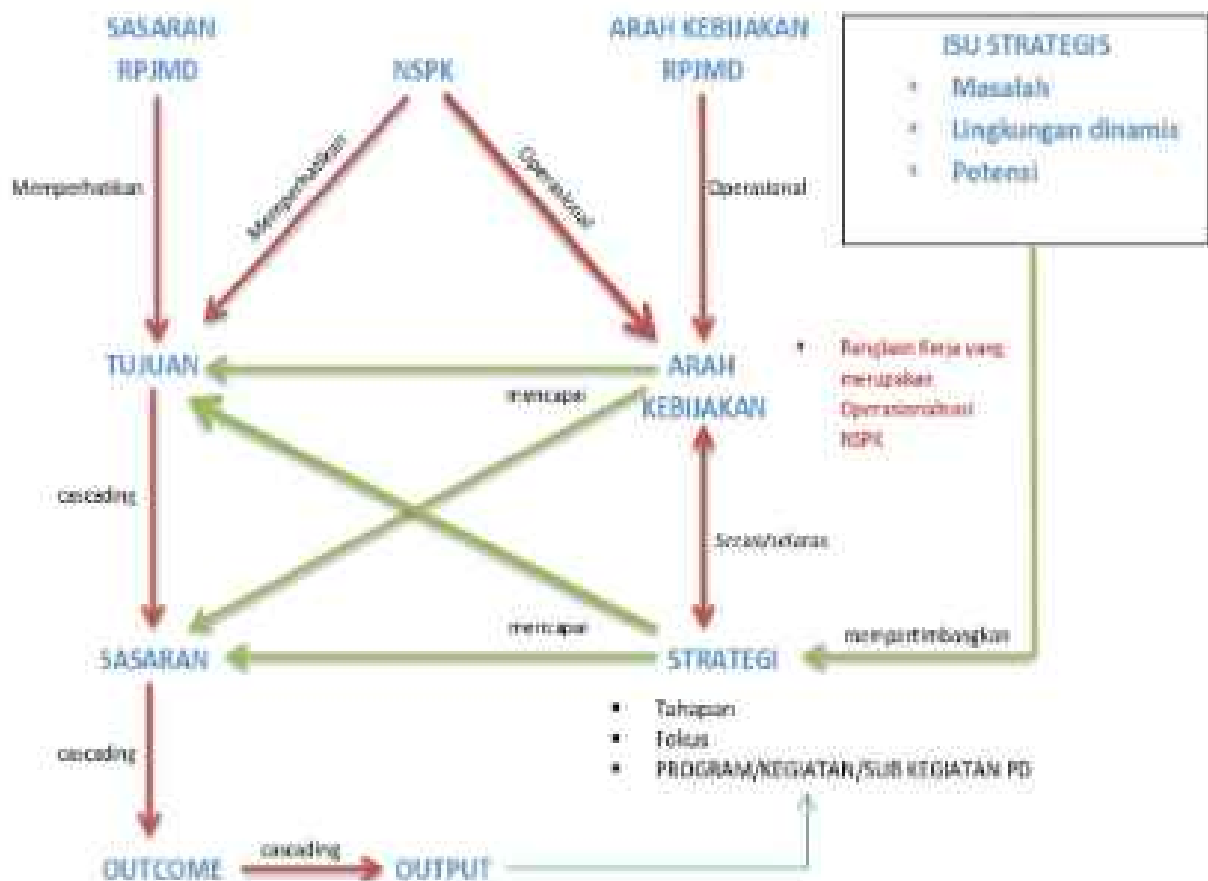
1. Mempromosikan budaya Melayu dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, pariwisata, dan industri kreatif.
2. Mendorong penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi resmi dan edukasi sebagai bagian dari identitas daerah.
3. Mengembangkan festival budaya dan seni Melayu sebagai strategi meningkatkan kebanggaan daerah serta daya tarik wisata.
4. Mengembangkan kebijakan ekonomi kreatif berbasis budaya Melayu untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional.
5. Memanfaatkan media sosial dan digital sebagai sarana edukasi budaya serta promosi identitas lokal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

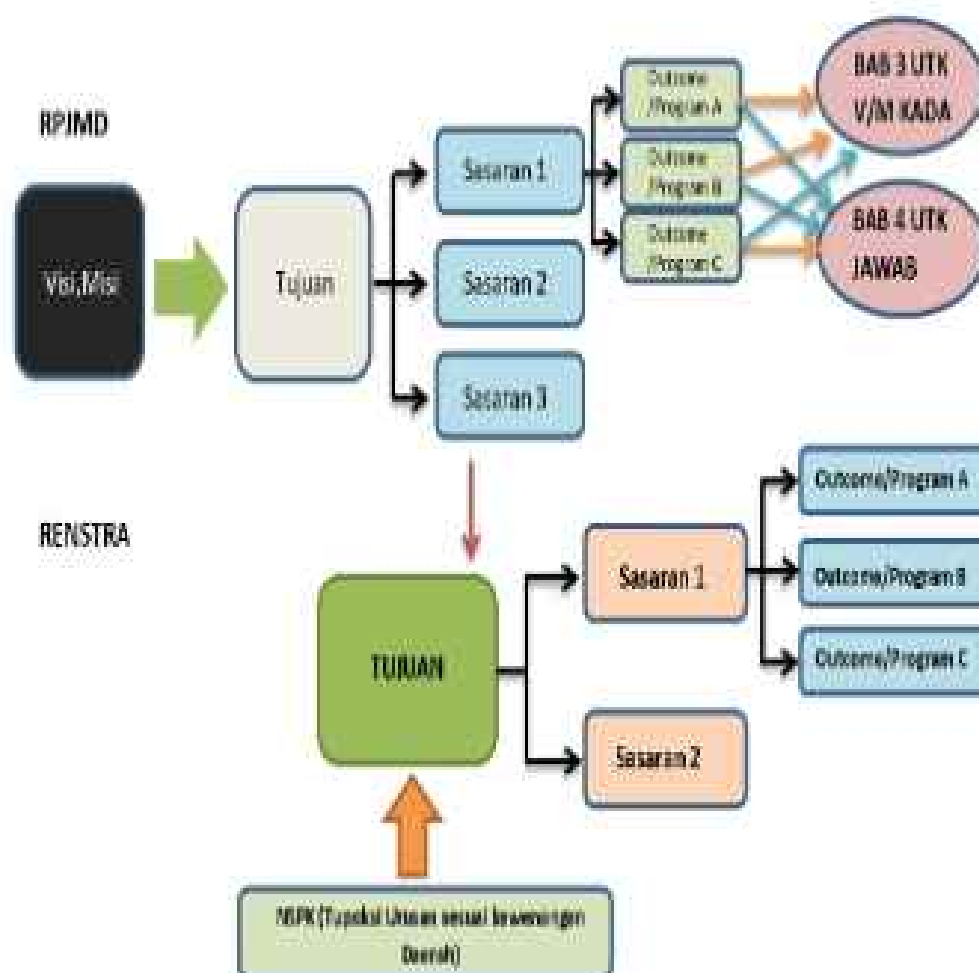
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 telah dirumuskan secara terpisah dan jelas, serta selaras dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis, khususnya misi penguatan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan pelestarian budaya Melayu.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Dalam konteks Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan pencapaian nyata dari pelaksanaan Tujuan. Jika Tujuan masih bersifat umum (kualitatif), maka Sasaran harus bersifat lebih spesifik, terukur, dan memiliki target waktu yang jelas. Sasaran Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dirumuskan sebagai kondisi hasil (*outcome*) dari pencapaian tujuan, antara lain terwujudnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, meningkatnya kualitas kepemudaan, prestasi olahraga, dan pelestarian budaya Melayu.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis telah diturunkan dari sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 dan disajikan dalam kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra PD sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.1 dan Gambar keterkaitan sasaran.

Strategi Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis telah dirumuskan untuk menjawab pencapaian tujuan dan sasaran, antara lain melalui peningkatan daya tarik dan promosi wisata, penguatan ekonomi kreatif, peningkatan prestasi olahraga, serta pengembangan kualitas kepemudaan dan pelestarian budaya. Arah kebijakan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis telah disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Tabel 3.1
 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan
 Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis 2025-2029

Visi: Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermanwah, Maju Dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia			
Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA	Terwujudnya Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru	Meningkatkan daya Tarik dan Promosi Wisata	Meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penguatan promosi, inovasi, dan pengembangan destinasi serta pelaku usaha kreatif, serta mendorong peran koperasi sebagai wadah kolaboratif dalam pemasaran produk, pembiayaan usaha, dan penguatan jejaring pelaku usaha
	Meningkatnya kualitas kepemudaan daerah	Meningkatkan prestasi olahraga dan Kualitas Kepemudaan	Mendorong prestasi olahraga dan Kualitas Kepemudaan
Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu	Meningkatnya pelestarian budaya melayu	Meningkatkan pelestarian budaya Melayu melalui pemeliharaan situs bersejarah dan penguatan perlindungan hukum terhadap karya seni dan warisan budaya.	Mendorong pelestarian budaya melalui restorasi situs Melayu dan penguatan perlindungan hukum terhadap warisan budaya daerah

Pada Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis menjelaskan tujuan, sasaran, indikator dari Tahun 2025-2030 serta target yang akan dilaksanakan dengan capaian sesuai hasil yang baik oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis agar tepat sasaran dan efektif. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dirumuskan secara jelas, terukur, dan relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta menggambarkan *intermediate outcome* sesuai kewenangan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2030

MSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KBT
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA	Tereujudnya Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru	Meningkatnya Penerimaan/Pendapatan Pariwisata	Persentase PAD Pariwisata	4,24	4,27	4,28	4,32	5,18	5,15	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berakarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu	Meningkatnya pelestarian budaya melayu	Meningkatnya Penetapan Warisan Budaya	Jumlah warisan budaya	87	88	89	90	91	92	
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA	Meningkatnya kualitas kepemudaan daerah	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Wirausaha Muda	0,0003	0,0003	0,0004	0,0004	0,0005	0,0006	
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA	Meningkatnya kualitas kepemudaan daerah	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet masuk pelatnas	12	1	1	1	1	1	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berakarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76	77	77	78	79	81	

Pada Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah maksudnya adalah urutan langkah-langkah sistematis yang wajib dilalui oleh setiap dinas atau badan di pemerintahan daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan 5 tahunan. Penahapan ini bukan sekedar urutan administratif, melainkan proses untuk memastikan bahwa rencana kerja perangkat daerah selaras dengan visi-misi Kepala Daerah (RPJMD) dan kebutuhan nyata di lapangan. Penahapan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis telah disajikan dalam bentuk tahapan pembangunan tahunan selama periode 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Tabel Penahapan Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
•Penyiapan Kalender Tahunan •Pengembangan Destinasi Wisata Kebun Binatang di Selat Baru Kecamatan Bantan •Pembentukan Tim Cagar Budaya •Penyiapan Pertup berprestasi Melayu •Rehab Stadion Muhammad Ali di Desa Air Putih •Seleksi Pemuda Pelopor atau pemuda berprestasi di Kecamatan Mandau	•Mengidentifikasi dan memperbanyak Jenis Event Wisata •Pembinaan dan Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya seperti : Makam, Perjaras Lama dan lain-lain •Rehab Gor Perkasa Alam •Pelatihan wirausaha muda di Bengkalis	•Sarana dan Prasarana Pariwisata di Pantai Ketapang Kecamatan Rupa •Penataan Ulang (Desain) Kawasan Wisata Darul Laksamana Raja Dilaut •Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan aset seperti : Kolam Renang, Water Boom dan lain-lain •Pelatihan Kader Pemuda	•Penyiapan Kalender Tahunan •Sarana dan Prasarana Pariwisata di Pantai Papet Tunggal •Kerjasama dengan LAMR Bengkalis dalam pengembangan budaya melayu	•Melaksanakan koordinasi, asistensi serta monitoring dan evaluasi dalam program kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya

Pada Tabel 3.4 Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah maksudnya adalah panduan atau rambu-rambu yang ditetapkan untuk menentukan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran strategis secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun. pemberian arah yang jelas agar setiap program dan kegiatan yang dipilih benar-benar efektif, efisien, dan konsisten dalam mencapai visi-misi yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis menjadi dasar penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum pada BAB selanjutnya, sehingga menunjukkan keterpaduan antar BAB dalam Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO.	OPERASIONALISASI NSPM	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Urusan Pihian Bidang Pariwisata	Meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penguatan promosi, inovasi, dan pengembangan destinasi serta pelaku usaha kreatif, serta mendorong peran koperasi sebagai wadah kolaboratif dalam pemasaran produk, pemasaran usaha, dan penguatan jejaring pelaku usaha	-Melakukan promosi dengan memanfaatkan fotografi dan video konten untuk memperluas jangkauan dan menarik minat wisatawan. -Menciptakan produk dan jasa baru yang memberikan nilai tambah pada pengalaman pariwisata dan memperkaya kekayaan budaya. -Meningkatkan kualitas infrastruktur fisik dan non-fisik di destinasi pariwisata untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas pelayanan. -Memberikan dukungan dan pengembangan kapasitas kepada pelaku usaha kreatif agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing	
2	Urusan Penunjang Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Mendorong prestasi olahraga dan Kualitas Kepemudaan	-Meningkatkan kapasitas dan keterampilan pemuda -penguatan kolaborasi -pembangunan infrastruktur -penyederhanaan regulasi -penguatan pembinaan atlet dan tenaga keolahragaan -kolaborasi lintas sektor dengan masyarakat dan dunia usaha	
3	Urusan Penunjang Bidang Kebudayaan	Mendorong pelestarian budaya melalui restorasi situs Melayu dan penguatan perlindungan hukum terhadap warisan budaya daerah	-Mertaga situs Melayu dan konservasi nilai keunikan agar nilai-nilai luhurnya tetap dipertahankan dari generasi ke generasi -Memperkuat identitas dan kearifatan bangsa melalui pelestarian cagar budaya -Mendapatkan manfaat ekonomi dari pelestarian budaya melalui promosi pariwisata berbasis budaya -Melakukan upaya pemulihatan dan perbaikan situs-situs bersejarah Melayu agar kembali utuh dan dapat dinikmati oleh masyarakat -Monyonggorkan acara-acara budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya dan mendorong interaksi antar komunitas budaya -Memperkuat peraturan dan undang-undang yang melindungi warisan budaya daerah dan tindakan perusakan, perusakan atau pengabaian.	

BAB VI

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Rencana dan program dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 900.1 - 2850 Tahun 2025 direncanakan pada periode Renstra tahun 2025-2030. Berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis :

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- h. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD;

- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah;
 - d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pengadaan Mebel;
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - s. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Mebel;
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah;
 - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota;
 - b. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota;
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota;
 - e. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota.

2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - b. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - c. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - d. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - f. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - b. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - c. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - d. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - f. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - g. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya;
 - i. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota;
 - c. Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota;
 - d. Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota;

- e. Sertifikat standar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi);
 - f. Ketersediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota;
 - g. Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota;
 - h. Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi);
 - i. Pelaksanaan Fasilitas Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
5. Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten/Kota

III. Program Pemasaran Pariwisata

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri;
 - b. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - d. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - e. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.
2. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan;
 - b. Fasilitas pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah;

IV. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif.
2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Pendidikan;
 - b. Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan;
 - c. Penyediaan Infrastruktur;
 - d. Pengembangan Sistem Pemasaran;
 - e. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - f. Fasilitasi Pemberian Insentif;
 - g. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah;
 - h. Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual;
 - j. Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual;
 - k. Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah;
 - l. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - m. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual;

V. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif;
 - b. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
 - c. Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI;
 - d. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata;
 - e. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata;
 - f. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - g. Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif;
2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

VI. Program Pengembangan Kebudayaan

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan;
 - c. Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota;
 - d. Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
 - e. Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan.
2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya;
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional;
 - c. Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.
3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat;
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat;
 - c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat.
4. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan berikut :
 - a. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota;
 - b. Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota;
 - c. Integrasi Dokumen PPKD Ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan berikut :
 - a. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota;
 - b. Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota;
 - c. Integrasi Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

VII. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional;
 - b. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan;
 - c. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional.

VIII. Program Pembinaan Sejarah

1. Pembinaan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah;
 - c. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah.

IX. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya;
 - b. Penetapan Cagar Budaya;
 - c. Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda.
2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelindungan Cagar Budaya;
 - b. Pengembangan Cagar Budaya;
 - c. Pemanfaatan Cagar Budaya;
 - d. Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.
3. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi di Kabupaten/Kota;
4. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya;
 - b. Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

X. Program Pengelolaan Permuseuman

1. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu;
 - b. Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman;
 - c. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum;
 - d. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum;
 - e. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum;
 - h. Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum;

XI. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor;
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula;
 - c. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan;
 - d. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota;
 - e. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi;
 - f. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda;
 - g. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
 - h. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota;
 - i. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota;

- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha.

XII. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

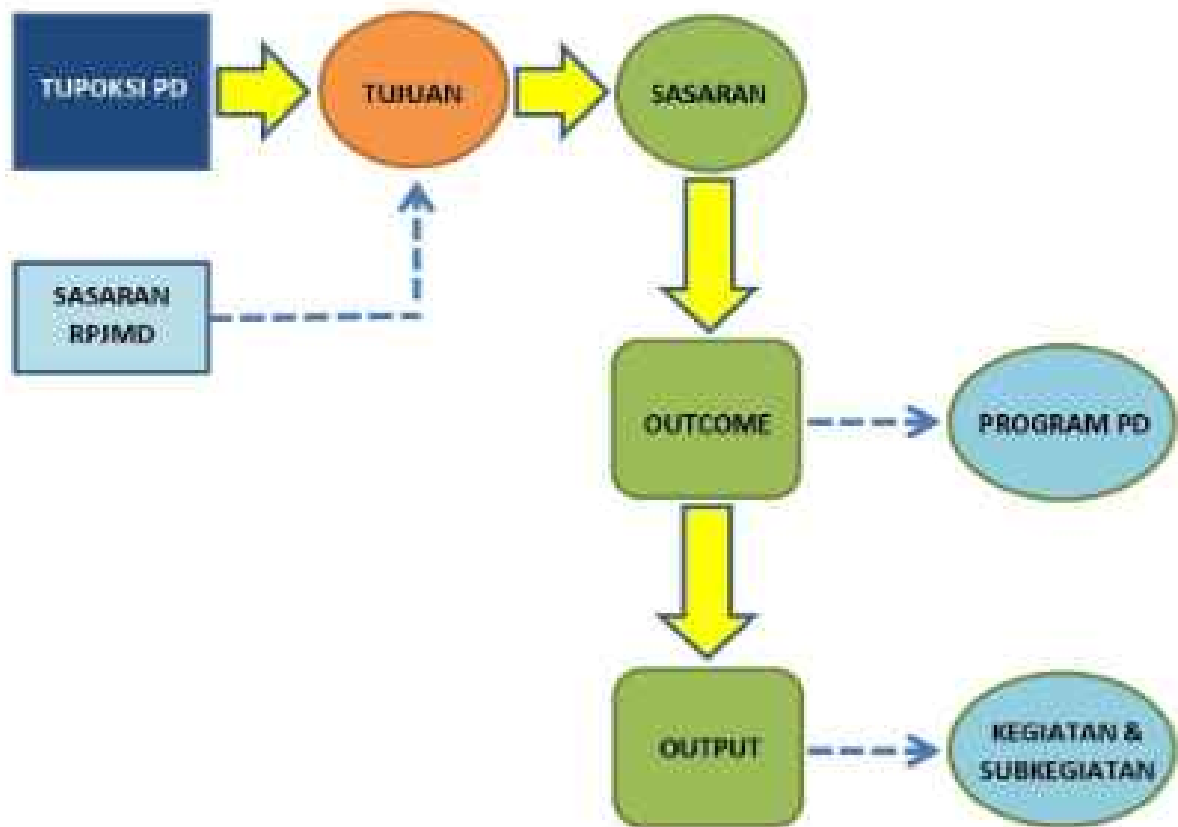
1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha;
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar;
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan;
 - c. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota.
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science);
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota;
 - c. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota;
 - d. Seleksi Atlet Daerah;
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga.
4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Organisasi Keolahragaan;
 - b. Standardisasi Organisasi Keolahragaan;
 - c. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait;
 - d. Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi.

5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi;
 - b. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi;
 - c. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi;
 - e. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan.

XIII. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah;
 - b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah;
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik;
 - d. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah;
 - e. Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah;
 - g. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah;
 - h. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

RP/RK DAN SASARAN RP/RKD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA	Terejadinya Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum		
		Meningkatnya Pemasaran/Pendapatan Pariwisata			Persentase PAD Pariwisata		
			Meningkatnya destinasi pariwisata		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
				Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dibebankan	Peningkatan Kapasitas SUM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Pelaksanaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	

NSRF DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(11)
				Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Terjadinya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpeliharai dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NRPE DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pencapaian Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Serana dan Pasarana Pengkajian Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpantau	Pengadaan/Pemeliharaan/Reliabilitas Serana dan Pasarana dalam Pengkajian Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Mendapatkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengkajian Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pencapaian Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengkajian Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tertetapnya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	

RPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)
					Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	
					Jumlah Pelaku Pemasaran dan Ekonomi Kreatif yang di Fasilitas Standartisasi dan Sertifikasi Usahanya	Pelaksanaan Fasilitas Standartisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	
			Meningkatnya pemasaran pariwisata		Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Pemasaran Pariwisata	
				Tertaksonanya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	

INDIKATOR DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)
					Jumlah Kegiatan Pemaksimalan Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Facilities Kegiatan Pemaksimalan Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Meningkatnya ekonomi kreatif		Persentase produk ekonomi kreatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
				Tersedianya Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif	Persentase Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang terakreditasi	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
				Tersedianya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase pelaku pariwisata dan kreatif tersertifikasi	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	REK.
(1)	(2)	(3)			(5)		(7)
				Tertaksonominya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produk, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Fasilitas Proses Kreasi, Produk, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
					Jumlah SUM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
					Jumlah SUM Pariwisata yang Dikembangkan Kapabilitasnya Berdasarkan pada SKKRI	Pengembangan Kapasitas SUM Pariwisata Berdasarkan SKKRI	
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pembedayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Pembedayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkeadilan dengan pengujian nilai agama dan budaya Melayu	Meningkatkan prestasi budaya melayu				Indeks Prestasi dan Budaya Melayu		

KEPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(11)
		Meningkatnya Penetapan Warisan Budaya		Jumlah warisan budaya			
			Meningkatnya pengembangan kebudayaan		Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan	
				Tertapanya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Pemerataan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasetia Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasetia Kebudayaan	
					Jumlah PPMK Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Penyusunan, Pemutakhirkan, Penetapan Policy/Nilai Kebudayaan Daerah (PPMK) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Online	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	
					Jumlah Lembaga dan Prasetia Kebudayaan yang Online	Pembinaan Lembaga dan Prasetia Kebudayaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)			(4)		(11)
				Terdapatnya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelelangan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Pelelangan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
					Jumlah Laporan Pemajuan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Peningkatan Tradisional	Peningkatan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Peningkatan Tradisional	
					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
				Terdapatnya Pembinaan Lembaga Adat yang Pengikutnya dalam Daerah	Persentase Pembinaan Lembaga Adat yang Pengikutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengikutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelelangan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Pelelangan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	

WISMA DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDICATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)
					Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Praktek Adat yang Dibina	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Praktek Adat	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	
			Meningkatnya pengembangan seni tradisional		Persentase kesenian tradisional dilestarikan	Pengembangan Kesenian Tradisional	
				Terselenggaranya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensi)	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
					Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya akses informasi sejarah		Partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	Pembinaan Sejarah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(11)
				Tertindakannya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Peningkatan Akses Masyarakat Terdapat Data dan Informasi Sejarah	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
				Tertindakannya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Ditetapkan	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya	
					Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Pengajuan Warisan Budaya tak Benda	
			Meningkatnya tata kelola museum		Persentase kunjungan museum	Pengelolaan Permuseuman	
				Tertindakannya Pengelolaan Museum	Persentase Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	

NSRF DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ RESISTAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(6)		(7)
					Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseum yang Meningkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseum	
					Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	
Meningkatkan perkembangan daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan RDA	Meningkatnya kualitas lingkungan daerah				Jumlah Prosesi Olahraga (jateng)		
		Meningkatnya daya saing kepemudaan			Persentase Wirausaha Muda		
			Meningkatnya kemandirian pemuda		Persentase Pemuda Mandiri	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
				Terapainya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)
					Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah RAD Tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan telah bekerja dalam memajukan potensi pemuda	
					Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang bakinya terpanahi	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dan Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	

KEMERDEKAAN DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKT
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)
					Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Penyediaan dan Penguatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah organisasi kepemudaan yang aktifitas dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan: Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peningkatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas kepramukaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (16-30 Tahun)	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
					Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	

NEPE DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(11)
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
					Jumlah SUM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas SUM Kepramukaan Tingkat Daerah	
					Jumlah Pinal Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Penyediaan Pinal Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang tersedia dan termanfaatkan	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	
					Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Partisipasi dan Keterlibatan dalam Kegiatan Kepramukaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(11)
Meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat yang berdaya-sang dalam peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA	Meningkatnya kualitas kepemimpinan daerah				Jumlah Prestasi Olahraga (cabang)		
		Meningkatnya Prestasi Olahraga			Jumlah Atlet masuk pelatihan		
			Meningkatnya Pembinaan Cabang Olahraga		Jumlah atlet berprestasi	Pengembangan Kapasitas Daya Saling Keolahragaan	
				Tertakutannya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahraga di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/REGUTAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(11)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembedayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembedayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kejurnas Olahraga Tingkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kejurnas Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejurnas Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kejurnas Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejurnas Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejurnas Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pekan Paralimpih Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejurnas Paralimpih Pelajar Tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejurnas Tingkat kabupaten/kota	Kekukuhannya anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejurnas olahraga	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Atlet Daerah yang Disekolai	Solikasi Atlet Daerah	

MBPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	REK
(I)	(II)	(III)			(IV)		(V)
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berprestasi dalam memajukan Olahraga	
					Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Ditinjau dan Diberikan Pengembangan	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
					Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	
				Terdapatnya Personalia dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Poliklasik dan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(11)
				Terbekalannya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pembedayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Pembedayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Penguatan	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Penguatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
					Jumlah Piasana dan Sarana Kapramukaan Kabupaten/kota yang Terseleksi dan Termanfaatkan	Penyediaan piasana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	
					Jumlah Lembaga yang berfasilitas dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Pemassakan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, akuntabilitas, dan transparan berakhlak dengan pengantoran nilai agama dan budaya Melayu	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah				akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		

NSRF DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB-KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(11)
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Usulan Pemerintahan Daerah		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(11)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tertekunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menorita Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

REPEK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen dalam Tanggapan Pemertiksaan dan Index Lamput Pemertiksaan	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemertiksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen: Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tetapannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	

NRPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(11)
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyesuaian Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyesuaian Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemertanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemertanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

KEPEK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(11)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terterselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Bertasik Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Bertasik Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Pemangkas Deras atau Kendaraan Deras Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Pemangkas Deras atau Kendaraan Deras Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Deras Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Deras Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	

KEPELOMPOK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terkabarnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

KEM DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN BESK KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tertatasnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sab Kegiatat : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSRF DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)			(4)		(11)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Pemertan/Perehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemertan/Perehabilitasi	Pemertan/Perehabilitasi Tanah	

4.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ditetapkan didalam program, kegiatan dan sub kegiatan yakni sarana, prasarana dan layanan yang menjadi urusan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Penetapan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 – 2030 sebagaimana tertuang pada Tabel sebagai berikut :

REKAM JEJAK PROGRAM/KOMUNITAS KEMASUKAN (OUTPUT)	INDIKATOR OUTPUT/KOMUNITAS	BAGIAN 2024	TARGET SAMPAI BUKU TAHUN										KBT
			2025		2027		2029		2029		2029		
			TARGET 1	PM25	TARGET 1	PM25	TARGET 1	PM25	TARGET 1	PM25	TARGET 1	PM25	
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinergisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Pemuda Asli Pemuda Pokok Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pokok Tingkat kabupaten/kota dari Daerah Kabupaten/Kota yang efektif dalam Pengembangan Kapasitas Pemuda	75 Orang	150 Orang	750.000.000	750 Orang	750.000.000	750 Orang	750.000.000	750 Orang	750.000.000	750 Orang	750.000.000	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda kepanitiaan di tingkat kabupaten/kota yang efektif	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	2.388.998.999	100%	2.415.305.999	100%	2.458.000.000	100%	2.515.799.999	100%	2.601.599.999	
Sub Kegiatan : Koordinasi, sinergisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Efektif Kabupaten/Kota	1 Organisasi	1 Organisasi	1.800.000.000	1 Organisasi	1.845.305.999	1 Organisasi	1.908.000.000	1 Organisasi	2.065.799.999	1 Organisasi	2.107.599.999	
Sub Kegiatan : Koordinasi, sinergisasi, dan penyelenggaraan Peningkatan organisasi kepemudaan melalui kegiatan berbasis penguatan komandani dalam pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang efektif dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	80 Orang	80 Orang	650.000.000	80 Orang	650.000.000	80 Orang	650.000.000	80 Orang	650.000.000	80 Orang	650.000.000	
REKAM JEJAK PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS BAKA SANG KECIL/ANAK	Peningkatan Prestasi Olahraga (Pomprok)	10 Baku	10	28.966.198.603	10	29.807.587.983	10	30.718.177.635	10	31.708.543.499	10	32.813.945.088	
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	4.408.198.603	100%	5.370.000.000	100%	5.370.000.000	100%	5.508.543.499	100%	6.608.999.999	
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinergisasi dan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan atletis olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Atletis Olahraga yang efektif dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	1 Unit	1 Unit	180.188.632	1 Unit	180.000.000	1 Unit	180.000.000	1 Unit	180.043.493	1 Unit	200.000.000	

URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS MANAJERIAL KELOMPOK KAWILKUMHUTAN	INDUK (MATERI/TAHUN)	SASARAN (JMLAH)	TARGET TAHUNAN KAWILKUMHUTAN										KES.
			2024		2025		2026		2027		2028		
			TARGET (%)	PAJAK (%)	TARGET (%)	PAJAK (%)	TARGET (%)	PAJAK (%)	TARGET (%)	PAJAK (%)	TARGET (%)	PAJAK (%)	
Sub-Registan : Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan/atau sarana kesehatan kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	13 unit	13 unit	4.000.000.000	13 unit	5.000.000.000	13 unit	5.000.000.000	13 unit	5.000.000.000	21 unit	6.000.000.000	
Sub-Registan : Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Forum/Forum Olahraga dan Penyelenggaraan Komite dan Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Forum/Forum Olahraga dan Penyelenggaraan Komite dan Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	200.000.000	
Registan : Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	
Sub-Registan : Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Multi Pori dan Single Pori Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Olahraga Multi Pori dan Single Pori Tingkat Kabupaten/Kota	2 kegiatan	2 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	500.000.000	1 kegiatan	500.000.000	
Sub-Registan : Penyelenggaraan Pesta Olahraga Tingkat Daerah Nasional dan Kabupaten/Kota serta Kegiatan Harian/ Mingguan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pesta dan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	40.000.000	
Sub-Registan : Koordinasi anggota kelompok kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan acara dan kegiatan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kegiatan Tingkat kabupaten/kota	150 orang	150 orang	3.000.000.000	150 orang	3.000.000.000	200 orang	4.000.000.000	200 orang	4.000.000.000	300 orang	4.000.000.000	
Registan : Pelaksanaan dan Pengembangan (Olahraga Prestasi) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100%	100%	3.750.000.000		4.750.000.000		7.750.000.000		7.000.000.000		8.750.000.000	
Sub-Registan : Swasta Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Terbuka	100	100 orang	500.000.000	100 orang	500.000.000	100 orang	500.000.000	100 orang	500.000.000	100 orang	500.000.000	
Sub-Registan : Pembinaan Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi secara nasional dan internasional	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100	100 orang	3.000.000.000	100 orang	3.000.000.000	100 orang	4.000.000.000	100 orang	4.000.000.000	100 orang	4.000.000.000	
Sub-Registan : Pembinaan Latihan Dasar yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pembinaan Latihan Dasar yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (Sport Science)	10	10 peserta	2.000.000.000	10 peserta	3.000.000.000	10 peserta	3.000.000.000	10 peserta	3.000.000.000	10 peserta	4.000.000.000	
Sub-Registan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dan Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Olahraga dan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Didukung oleh Pemerintah	100	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	200.000.000	

SASARAN STRATEGIS PENGKUALIFIKASIAN/PEMBINAAN DATA KEKAWAHLAN (KAWITEST)	INDIKATOR OUTPUT/OUTPUTS	DASAR STRATEGIS	TARGET LUNTAH/INDIKATOR TAHUN										K3
			2024		2025		2026		2027		2028		
			TARGET	INDIK	TARGET	INDIK	TARGET	INDIK	TARGET	INDIK	TARGET	INDIK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Regulasi : pemeliharaan dan Perbaikan sistem data Kekawajiban khusus di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemeliharaan data Kekawajiban khusus di Kabupaten/Kota	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Regulasi : Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pemertanian Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100%	100%	5.850.000.000	100%	5.850.000.000	100%	5.850.000.000	100%	7.100.000.000	100%	7.100.000.000	
Sub Regulasi : Pelaksanaan standar nasional pengelolaan Organisasi Kekawajiban di Kabupaten/Kota	Pemertanian pengelolaan organisasi kekawajiban di Kabupaten/Kota sesuai standar nasional	1	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	
Sub Regulasi : Peningkatan Kerja Sama Organisasi Kekawajiban Kabupaten/Kota dengan Lembaga Tertarik	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Kekawajiban Kabupaten/Kota	4	4 Dokumen	5.800.000.000	4 Dokumen	5.800.000.000	4 Dokumen	5.800.000.000	4 Dokumen	5.800.000.000	4 Dokumen	5.800.000.000	
Regulasi : Peningkatan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemertanian Peningkatan dan Pengembangan (Olahraga Rekreasi)	100%	100%	140.000.000	100%	937.947.940	100%	948.177.430	100%	1.150.000.000	100%	1.410.945.000	
Sub Regulasi : Pambinaan Peningkatan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan dalam rangka Pambinaan Peningkatan Olahraga Rekreasi	1	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	400.000.000	
Sub Regulasi : Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Pelestarian	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Peningkatan dan Olahraga Wisata, Tantangan dan Pelestarian	1	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	
Sub Regulasi : Pemertanian Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	
Sub Regulasi : Pemertanian program dan sarana olahraga sebagai media pemertanian, pengajaran, pemertanian, pemertanian, dan pemertanian	Jumlah Pemertanian dan Sarana Pemertanian Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Pemertanian	3	3 unit	30.000.000	3 unit	30.000.000	3 unit	30.000.000	3 unit	300.000.000	3 unit	300.000.000	
Sub Regulasi : Pemertanian olahraga dan pemertanian festival Olahraga Rekreasi yang berjangka dan pemertanian pada lingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang berpartisipasi dalam Pengembangan dan Pemertanian Festival dan Olahraga Rekreasi	1	1 lembaga	100.000.000	1 lembaga	207.947.940	1 lembaga	208.177.430	1 lembaga	750.000.000	1 lembaga	300.000.000	
DAFTAR KEMERDEKAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERAWATAN	Pemertanian Peningkatan Perawatan dalam Keperawatan	70%	70%	852.781.915	70%	798.943.369	70%	691.145.496	70%	686.316.738	70%	794.942.968	
Regulasi : Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Keperawatan	Pemertanian Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Keperawatan	100%	100%	852.781.915	100%	798.943.369	100%	691.145.496	100%	686.316.738	100%	794.942.968	
Sub Regulasi : Koordinasi dan Informasi Peningkatan Data dan Informasi Keperawatan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Informasi Keperawatan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Pemertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	

GEOGRAFI, URAIAN PROGRAM/KELOMPOK/LOKASI/KELOMPOK/DAERAH (GKLOK)	INDUKTOR (KUALITATIF/KUANTITAS)	SASARAN/TAHAP	TARGET DISPARBUDPORA TAHUN										REK.
			2025		2027		2029		2031		2033		
			LOKASI/TAHAP	PAJAK	LOKASI/TAHAP	PAJAK	LOKASI/TAHAP	PAJAK	LOKASI/TAHAP	PAJAK	LOKASI/TAHAP	PAJAK	
2025	2027	2029	2031	2033	2035	2037	2039	2041	2043	2045	2047	2049	2051
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Organisasi Keparamusulan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Keparamusulan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	600.000.000	1 Organisasi	600.000.000	1 Organisasi	600.000.000	1 Organisasi	600.000.000	1 Organisasi	600.000.000	
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas UKM Keparamusulan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah UKM Keparamusulan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Orang	10 Orang	60.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	30.000.000	
Sub Kegiatan : Penyediaan Pusat Penelitian dan Pelatihan Keparamusulan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Penelitian dan Pelatihan Keparamusulan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkelanjutan	2 Unit	2 Unit	12.785.915	2 Unit	40.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	40.000.000	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Keparamusulan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Keparamusulan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	70.000.000	
Sub Kegiatan : Penyediaan Fasilitas dan Sarana Keparamusulan Tingkat Daerah	Jumlah Fasilitas dan Sarana Keparamusulan Kabupaten/Kota yang Terawat dan Tersantap	1 Unit	1 Unit	150.000.000	1 Unit	108.580.359	1 Unit	111.165.876	1 Unit	600.000.000	1 Unit	104.947.068	
Sub Kegiatan : Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelesaian Pemenuhan dan Sarana Keparamusulan Tingkat Daerah	Jumlah Fasilitas dan Sarana Keparamusulan Tingkat Daerah yang Terawat dan Tersantap	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	
Sub Kegiatan : Partisipasi dan Keterlibatan dalam Kegiatan Keparamusulan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Keparamusulan	20 Organisasi	20 Organisasi	10.000.000	20 Organisasi	20.000.000	20 Organisasi	10.000.000	20 Organisasi	10.000.000	20 Organisasi	20.000.000	
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM PLAKUMDIANGAN KABUPATEN	Pemenuhan Kebutuhan yang dilaksanakan	80%	80%	1.178.487.449	80%	1.322.186.898	80%	1.376.387.447	80%	1.597.347.447	80%	1.123.817.447	
Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Peka dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Peka dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	1.016.457.394	100%	1.322.186.898	100%	1.288.080.000	100%	1.402.950.180	100%	1.402.950.180	
Sub Kegiatan : Pendukung, Pengembangan, dan Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Didukung, Pengembangan, dan Pemeliharaan	3 objek	3 objek	576.457.394	3 objek	600.000.000	3 objek	600.000.000	3 objek	600.000.000	3 objek	700.000.000	
Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pemada Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pemada Kebudayaan	10 Orang	10 Orang	200.000.000	5 orang	130.000.000	5 orang	130.000.000	5 orang	160.000.000	5 orang	160.000.000	
Sub Kegiatan : Penyusunan, Pemeliharaan, dan Pemantauan Peta dan Kebudayaan Daerah (PMDK)	Jumlah PMDK Kabupaten/Kota yang Disusun, Ditinjau, dan Disiapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	62.857.180	1 Dokumen	62.857.180	
Sub Kegiatan : Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Didukung	5 orang	5 orang	300.000.000	5 orang	342.185.898	5 orang	300.000.000	5 orang	300.000.000	5 orang	300.000.000	

SEKANG URUSAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESEKUTAN TRADISIONAL	INDIKATOR DASAR/OUTPUT	HASIL 2024	TARGET DAN PENCAPAIAN TAHUN										KPI
			2025		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	AKHIR	TARGET	AKHIR	TARGET	AKHIR	TARGET	AKHIR	TARGET	AKHIR	
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Sub Kegiatan : Pemertuaan Lembaga dan Panitia Kabupaten	Jumlah Lembaga dan Panitia Kabupaten yang Ditua	5 lembaga	5 lembaga	200.000.000	5 lembaga	200.000.000	5 lembaga	200.000.000	5 lembaga	200.000.000	5 lembaga	200.000.000	
Regulasi : Pemertuaan Keasutan Tradisional yang Menyebabkan Pelekatnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemertuaan Pelekat Keasutan Tradisional yang Menyebabkan Pelekatnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	1.246.000.000	100%	1.246.000.000	100%	1.194.397.488	100%	1.194.397.488	100%	1.126.000.000	
Sub Kegiatan : Pelatihan, Pengembangan, Pemertuaan Objek Potensial dalam Budaya	Jumlah Objek Potensial Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelatihan, Pengembangan dan Pemertuaan	4 objek	4 objek	300.000.000	4 objek	300.000.000	4 objek	300.397.488	4 objek	300.397.488	4 objek	300.000.000	
Sub Kegiatan : Pemertuaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Panitia Tradisional	Jumlah Laporan Pemertuaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Panitia Tradisional	3 laporan	3 laporan	300.000.000	3 laporan	300.000.000	3 laporan	300.000.000	3 laporan	300.000.000	3 laporan	300.000.000	
Sub Kegiatan : Pemertuaan Penghargaan kepada Pihak yang Berkontribusi dalam Pelestarian Budaya, Tradisi dan Komunitas dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Lembaga yang Didat Penghargaan dalam Masyarakat yang Berkontribusi dalam Pelestarian Kabupaten/Kota	3 sertifikat	3 sertifikat	100.000.000	3 sertifikat	100.000.000	3 sertifikat	100.000.000	3 sertifikat	100.000.000	3 sertifikat	100.000.000	
Regulasi : Pemertuaan Lembaga Adat yang Pengertuaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemertuaan Pemertuaan Lembaga Adat yang Pengertuaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	790.000.000	100%	790.000.000	100%	800.000.000	
Sub Kegiatan : Pelatihan, Pengembangan, Pemertuaan Objek Potensial Lembaga Adat	Jumlah Objek Potensial Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelatihan, Pengembangan dan Pemertuaan	1 objek	1 objek	100.000.000	1 objek	100.000.000	1 objek	100.000.000	1 objek	100.000.000	1 objek	100.000.000	
Sub Kegiatan : Pemertuaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Panitia Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Panitia Adat yang Ditua	50 orang	50 orang	600.000.000	50 orang	600.000.000	50 orang	600.000.000	50 orang	600.000.000	50 orang	600.000.000	
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemertuaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Ditstasi	1 unit	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	90.000.000	1 unit	90.000.000	1 unit	100.000.000	
SEKANG URUSAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESEKUTAN TRADISIONAL	Pemertuaan Grup Keasutan Tradisional yang Dibentuk	70%	70%	156.756.471	70%	156.756.471	70%	172.791.424	70%	171.625.182	70%	156.988.411	
Regulasi : Pemertuaan Keasutan yang Menyebabkan Pelekatnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemertuaan Keasutan Keasutan yang Menyebabkan Pelekatnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	156.756.471	100%	156.756.471	100%	172.791.424	100%	171.625.182	100%	156.988.411	
Sub Kegiatan : Pemertuaan Pemertuaan dan Panitia Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Panitia Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Panitia Tradisional yang Mendapat Pemertuaan dan Panitia (Ditstasi/Komunitas)	20 orang	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	

JENJANG URUSAN PROGRAM/KELOMPOK/LOKASI KELOMPOK/LOKASI/UNIT/ITEL	INDIKATOR KUALITAS/QUANTITATIVE	MELAKUKI TAHUN	TARGET DAN PAJAK NERACI TAHUN										KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAJAK	TARGET	PAJAK	TARGET	PAJAK	TARGET	PAJAK	TARGET	PAJAK	
UR	IND	MT	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	UR
Sub Regulasi : Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Berbasis Tradisional Sesuai dengan Kebijakan dan Strategi	Jumlah Sumber Daya Manusia Berbasis Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	5 sertifikat	5 sertifikat	36.796.750	5 sertifikat	36.796.678	5 sertifikat	47.791.424	5 sertifikat	46.629.180	5 sertifikat	33.988.473	
Sub Regulasi : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Berbasis Tradisional	Jumlah Lembaga Kelembagaan Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga	24.000.000	1 lembaga	24.000.000	1 lembaga	24.000.000	1 lembaga	24.000.000	1 lembaga	24.000.000	
URUSAN URUSAN KEBUDAYAAN PROGRAM PEMBIYARAN PEMBAHARUAN	Jumlah Sejalan total yang dilaksanakan	3	3	3.375.113.150	3	4.418.628.258	3	4.817.480.691	10	3.226.628.633	10	2.762.297.240	
Regulasi : Pembiayaan Sejalan Evaluasi dan 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembiayaan Pembiayaan Sejalan Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.375.113.150	100%	4.418.628.258	100%	4.817.480.691	100%	3.226.628.633	100%	2.762.297.240	
Sub Regulasi : Pembiayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejalan Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejalan Lokal yang Ditingkatkan	2 orang	2 orang	300.000.000	2 orang	318.838.052	2 orang	160.000.000	2 orang	126.628.630	2 orang	160.000.000	
Sub Regulasi : Pembiayaan Sejalan dan Pembiayaan Pembiayaan Sejalan	Jumlah Sejalan dan Pembiayaan Pembiayaan Sejalan	8 unit	8 unit	3.000.000.000	8 unit	4.000.000.000	8 unit	3.000.000.000	8 unit	3.000.000.000	8 unit	2.000.000.000	
Sub Regulasi : Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas Informasi Sejalan	Jumlah Akses Data dan Informasi Sejalan yang Dapat Akses Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	118.111.150	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	117.400.011	1 Dokumen	88.999.990	1 Dokumen	102.297.240	
URUSAN URUSAN KEBUDAYAAN PROGRAM PESTASIAN DAN PEMERCIHAN CAGAR BUDAYA	Pembiayaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi	8%	8%	131.591.833	8%	186.477.785	8%	129.393.568	8%	137.303.346	8%	132.498.344	
Regulasi : Pembiayaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota	Pembiayaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota	100%	100%	131.591.833	100%	186.477.785	100%	129.393.568	100%	137.303.346	100%	132.498.344	
Sub Regulasi : Pembiayaan Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 objek	1 objek	27.000.000	1 objek	18.000.000	1 objek	16.000.000	1 objek	27.000.000	1 objek	27.000.000	
Sub Regulasi : Pembiayaan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 objek	3 objek	100.000.000	3 objek	30.000.000	3 objek	100.000.000	3 objek	100.000.000	3 objek	100.000.000	
Sub Regulasi : Penguatan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi	1 objek	1 objek	15.107.833	1 objek	6.077.785	1 objek	10.593.568	1 objek	15.303.346	1 objek	10.498.344	
URUSAN URUSAN KEBUDAYAAN PROGRAM PEMERCIHAN PEMBAHARUAN	Pembiayaan Objek Cagar Budaya Benda yang Dilindungi	100%	100%	91.838.483	100%	186.477.785	100%	129.393.568	100%	137.303.346	100%	132.498.344	
Regulasi : Penguatan Museum Kabupaten/Kota	Pembiayaan Penguatan Museum Kabupaten/Kota	100%	100%	91.838.483	100%	186.477.785	100%	129.393.568	100%	137.303.346	100%	132.498.344	
Sub Regulasi : Pembiayaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pembiayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pembiayaan yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	3 orang	3 orang	21.838.443	3 orang	22.477.785	3 orang	30.593.568	3 orang	37.303.346	3 orang	32.498.344	

BIDANG URUSAN PROGRAM/LOKASI/KEGIATAN WASDA/SAKSI/STAF/TA	INDIKATOR KUALITAS/QUANTITATIVE	BENTUK DATA	TARGET DAN PAU/INDIKATOR TAHUN										REK
			2020		2021		2022		2023		2024		
			TARGET	PAU	TARGET	PAU	TARGET	PAU	TARGET	PAU	TARGET	PAU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan : Pengkajian, Pelayanan dan Ases Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Ases Masyarakat Terhadap Museum	1 unit	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	
Sub Kegiatan : Penyelamatan dan Pemertahanan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Terawat dan Terpelihara	1 unit	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	
Sub Kegiatan : Rastakalasan, Rastakalasan dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Rastakalasan	1 unit	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	
Sub Kegiatan : Penyelidikan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum	1 Layanan			1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	
BIDANG URUSAN PARIWISATA PROGRAM PEMBIKSIAN DAYA TAHUN DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Asing	30%	30%	4.389.597.595	30%	3.031.566.229	30%	3.164.554.738	30%	3.413.272.080	30%	3.091.768.145	
Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100%	100%	100.000.000	100%	497.246.724	100%	267.246.724	100%	337.246.724	100%	267.246.724	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan/Perawatan dan Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Gedung, Berhimpun, Pemertahanan, Pemertahanan)	2 lokasi	2 lokasi	20.000.000	2 lokasi	20.000.000	2 lokasi	20.000.000	2 lokasi	20.000.000	2 lokasi	20.000.000	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 lokasi	267.246.724	2 lokasi	167.246.724	2 lokasi	107.246.724	2 lokasi	107.246.724	
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				11 Layanan	100.000.000	11 Layanan	100.000.000	11 Layanan	100.000.000	11 Layanan	100.000.000	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Diperkaya	30 orang	30 orang	75.000.000	30 orang	80.000.000	30 orang	80.000.000	30 orang	80.000.000	30 orang	80.000.000	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pemertahanan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemertahanan dan Pemertahanan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	64.000.000	2 dokumen	34.000.000	2 dokumen	14.000.000	2 dokumen	14.000.000	
Kegiatan : Penyelenggaraan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	100%	1.494.307.595	100%	1.498.117.585	100%	1.218.027.305	100%	1.225.117.585	100%	1.219.321.497	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Dokumen Penyelenggaraan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	114.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	114.000.000	1 Dokumen	114.000.000	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Dokumen Penyelenggaraan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	

Subsistem/Program/Proyek/Kegiatan/Manajemen/Unit	INSTRUMEN/OUTCOME/INDIKATOR	SASARAN JANGKA	TAMBAHAN PANGKALAN WISATA DEWATA										NET
			2025		2027		2028		2029		2030		
			Target 1	Value	Target 1	Value	Target 1	Value	Target 1	Value	Target 1	Value	
2025	2027	2028	2029	2030	2025	2027	2028	2029	2030	2025	2027	2030	2030
Sub Regulasi : Pengadaan/Perencanaan/Realisasi dan Pemantauan dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Saran dan Pemeran yang Terseleksi dan Terealisasi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	13 unit	13 unit	1.165.777.505	14 unit	945.292.505	14 unit	954.292.505	14 unit	845.292.505	14 unit	895.292.505	
Sub Regulasi : Perizinan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 lokasi	2 lokasi	100.000.000	2 lokasi	100.000.000	2 lokasi	100.000.000	2 lokasi	100.000.000	2 lokasi	100.000.000	
Sub Regulasi : Peningkatan Kapabilitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dibekali/dibekali	30 Orang	30 Orang	45.500.000	30 Orang	25.500.000	30 Orang	15.000.000	30 Orang	25.500.000	30 Orang	26.500.000	
Sub Regulasi : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	11 Laporan	11 Laporan	10.430.000	11 Laporan	10.430.000	11 Laporan	10.430.000	11 Laporan	10.430.000	11 Laporan	10.430.000	
Regulasi : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	100%	2.715.180.000	100%	1.945.290.000	100%	1.955.290.501	100%	1.775.907.801	100%	1.535.290.000	
Sub Regulasi : Perizinan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditajukan	1 lokasi	1 lokasi	10.000.000	1 lokasi	10.000.000	1 lokasi	10.000.000	1 lokasi	10.000.000	1 lokasi	10.000.000	
Sub Regulasi : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dibebaskan Sesuai dengan Tatanan Pengembangan (Rencana, Berkembang, Peningkatan, Growth)	1 lokasi	1 lokasi	10.000.000	1 lokasi	10.000.000	1 lokasi	10.000.000	1 lokasi	10.000.000	1 lokasi	10.000.000	
Sub Regulasi : Pemecatan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemecatan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	200.000.000	
Sub Regulasi : Pengadaan/Perencanaan/Realisasi dan Pemantauan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Saran dan Pemeran Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terseleksi dan Terealisasi	13 unit	13 unit	1.515.200.000	13 unit	1.115.200.000	13 unit	1.135.290.501	13 unit	995.907.801	13 unit	895.290.000	
Sub Regulasi : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.000.000	
Sub Regulasi : Peningkatan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 lokasi	10.000.000	2 lokasi	10.000.000	2 lokasi	10.000.000	2 lokasi	10.000.000	

REKAPITULASI PENGANTARAN OHS/WD/DAFTAR KORPORASI (KAPITULASI)	INFORMASI KORPORASI (KAPITULASI)	PERCENTAGE	TARGET DAN/ATAU KENDARAAN TARIK										KOT
			JSP		JSP		JSP		JSP		JSP		
			TARGET	AKSI	TARGET	AKSI	TARGET	AKSI	TARGET	AKSI	TARGET	AKSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan : Pengawasan Rencana (Rencana Pembangunan Korporasi) dan Korporasi	Jumlah Dokumen Rencana Rencana Pembangunan Korporasi dan Korporasi				1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	190.000.000	
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota				11 Laporan	120.000.000	11 Laporan	80.000.000	11 Laporan	80.000.000	11 Laporan	80.000.000	
Kegiatan : Penetapan Tarif Batas Atas Persewaan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Tarif Batas Atas Persewaan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	
Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pemeriksaan Kegiatan Usaha Usaha yang telah terdaftar di SPT (berdasarkan Peraturan No. 12 tahun 2002) dan SPT WAK (2021) dalam melaksanakan Standar OHS di Kab. Kota	Jumlah usaha pemerintah yang telah terdaftar di SPT yang telah terdaftar				10 usaha pemerintah	10.000.000	10 usaha pemerintah	10.000.000	10 usaha pemerintah	10.000.000	10 usaha pemerintah	10.000.000	
Sub Kegiatan : 1. Sistem Sertifikasi SPT WAK (2021) dan SPT di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pemerintah dan ekonomi kreatif yang diterbitkan sertifikat SPT WAK (2021)				10 usaha	10.000.000	10 usaha	10.000.000	10 usaha	10.000.000	10 usaha	10.000.000	
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pelayanan Publik (Korporasi Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Layanan Konsultasi dan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
Sub Kegiatan : Sertifikasi usaha usaha pemerintah yang diterbitkan oleh Korporasi (Korporasi)	Jumlah usaha yang terdaftar di Korporasi Kabupaten/Kota				10 usaha	10.000.000	10 usaha	10.000.000	10 usaha	10.000.000	10 usaha	10.000.000	
Sub Kegiatan : Koordinasi usaha usaha pemerintah standar usaha pemerintah di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang berkoordinasi dengan standar usaha pemerintah di Kabupaten/Kota				10 usaha	10.000.000	10 usaha	10.000.000	10 usaha	10.000.000	10 usaha	10.000.000	
Sub Kegiatan : Kegiatan Investasi Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	
Sub Kegiatan : Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Usaha yang telah diterbitkan Standar dan Sertifikasi Usaha	Jumlah Usaha Pemerintah dan Ekonomi Kreatif yang di Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota				30 usaha usaha	10.000.000	30 usaha usaha	10.000.000	30 usaha usaha	10.000.000	30 usaha usaha	10.000.000	
REKAPITULASI PENGANTARAN PROGRAM PEMERINTAHAN KORPORASI	Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	100%	72.146.1294	100%	660.815.456	100%	626.621.211	100%	572.638.917	100%	549.833.967	
Kegiatan : Penerapan Persewaan Daerah dan Luar Negeri Daya Tarik, dan/atau dan/atau Strategi Pemerintah Kabupaten/Kota	Penerapan Persewaan Daerah dan Luar Negeri Daya Tarik, dan/atau dan/atau Strategi Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	100%	72.146.1294	100%	660.815.456	100%	626.621.211	100%	572.638.917	100%	549.833.967	

INDUK INDUKAH PROGRAM/OUTPUT/INDUK DANA KABUPATEN/KOTA/DAERAH	INDUKASI OUTPUT/OUTPUT	INDUKSI KPAH	TARGET SUB-PACU WAKTU 1 TAHUN										KCL
			2020		2021		2022		2023		2024		
			TARGET 1 (%)	PAJAK (%)	TARGET 1 (%)	PAJAK (%)	TARGET 1 (%)	PAJAK (%)	TARGET 1 (%)	PAJAK (%)	TARGET 1 (%)	PAJAK (%)	
Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Penyediaan Informasi Pemasok Kabupaten/Kota, Sub Daerah dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyediaan Informasi Pemasok Kabupaten/Kota, Sub Daerah dan Luar Negeri	2 dokumen	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	
Sub Kegiatan : Pengembangan Kapsa Kerja dan Kerangka Pemasok Daerah dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kapsa Kerja dan Kerangka Pemasok Daerah dan Luar Negeri	2 dokumen	2 dokumen	254.040.160	2 dokumen	174.040.160	2 dokumen	174.040.160	2 dokumen	154.040.160	2 dokumen	143.020.472	
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasok Pemasok	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasok Pemasok				2 dokumen	70.000.000	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	70.000.000	
Sub Kegiatan : Laporan Kegiatan Pemasok Pemasok Sub Daerah dan Luar Negeri Pemasok Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasok Pemasok Sub Daerah dan Luar Negeri	2 laporan	2 laporan	100.000.000	2 laporan	100.000.000	2 laporan	100.000.000	2 laporan	100.000.000	2 laporan	100.000.000	
Sub Kegiatan : Pengujian Pemasok Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya dan Sub Daerah dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Pemasok Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya dan Sub Daerah dan Luar Negeri	2 Pemasok	2 Pemasok	100.000.000	2 Pemasok	100.000.000	2 Pemasok	100.000.000	2 Pemasok	100.000.000	2 Pemasok	100.000.000	
URAIAN URAIAN KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN PROMOSI KEPATIF MPA NIS PLASMA KALAH DAN PENGEMBANGAN KEKAYAAN RUMAH RUMAH	persentase produk ekspor dan impor yang memiliki keberagaman etnikitas	100%	100%	70.072.577	100%	60.072.463	100%	60.034.212	100%	55.436.024	100%	50.229.094	
Sub Kegiatan : Pengembangan Program (Zona Keras/Minang Keras/Kota Keras) sebagai Rukung Berkeadilan, Berprestasi dan Berkeadilan bagi Masyarakat dan Daerah Kabupaten/Kota	Pemantauan, Pengembangan Program (Zona Keras/Minang Keras/Kota Keras) sebagai Rukung Berkeadilan, Berprestasi dan Berkeadilan bagi Masyarakat dan Daerah Kabupaten/Kota				100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	
Sub Kegiatan : Pengembangan dan Inovasi Produk Pemasok Kota Keras	Jumlah Laporan Program Kota Keras yang terakumulasi				2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	
Sub Kegiatan : Pengembangan Pemasok Pemasok Keras	Pemantauan Pengembangan Pemasok Pemasok Keras	100%	100%	70.072.577	100%	60.072.463	100%	60.034.212	100%	55.436.024	100%	50.229.094	
Sub Kegiatan : Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Pemasok Keras yang diterbitkan				1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	

URUTAN PROGRAM/KELOMPOK/INDUKSI KEMENTERIAN/INSTITUT	INDUKSI KEMENTERIAN/INSTITUT	KATEGORI/INDUKSI	TARGET DAN PENCAPAIAN TAHUN										KETERANGAN
			2024		2025		2026		2027		2028		
			TARGET	PAKAI	TARGET	PAKAI	TARGET	PAKAI	TARGET	PAKAI	TARGET	PAKAI	
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sub Kegiatan : Fasilitas Pendidikan dan Penelitian	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendidikan dan Penelitian bagi Petani Ekonomi Kreatif												
Sub Kegiatan : Penguatan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur Ekonomi Kreatif yang selesai												
Sub Kegiatan : Pengembangan Sistem Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Perikanan Ekonomi Kreatif				1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	
Sub Kegiatan : Fasilitas pertanian smart	Jumlah smart yang selesai				10 petak sawah	5.000.000	10 petak sawah	5.000.000	10 petak sawah	5.000.000	10 petak sawah	5.000.000	
Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Umat	Jumlah lembaga/ organisasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif secara				1 lembaga	5.000.000	1 lembaga	5.000.000	1 lembaga	5.000.000	1 lembaga	5.000.000	
Sub Kegiatan : Fasilitas penguatan kawasan industri	Jumlah kegiatan/ orang yang mendapat fasilitas penguatan kawasan industri				1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	5.000.000	
Sub Kegiatan : Pengembangan Sistem Perikanan berbasis Inovasi Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Perikanan Ekonomi Kreatif berbasis inovasi teknologi												
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen strategi bidang ekonomi kreatif digital	Jumlah Dokumen strategi bidang ekonomi kreatif digital				1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sistem Ekonomi Kreatif	11 Laporan	11 Laporan	10.012.014	11 Laporan	10.012.400	11 Laporan	10.014.012	11 Laporan	10.016.014	11 Laporan	10.018.014	
Sub Kegiatan : Fasilitas Pendidikan Kelembagaan Industri	Jumlah orang hasil Pendidikan dan Hal-Opn- dan Hal- Lencat. Pendidikan Hal- Kelembagaan Industri kepada Petani Ekonomi Kreatif, serta Penguatan Kelembagaan Industri kepada Petani Ekonomi Kreatif				5 petak	5.000.000	5 petak	5.000.000	5 petak	5.000.000	5 petak	5.000.000	
Sub Kegiatan : Penguatan Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PKKRI)	Jumlah dokumen Beras Aksi Hasil (BAP) (BAPUP)												

URAIAN LEMBAR PROGRAM/PROJEK/KEGIATAN KINERJA (KIP/KIPK)	INDIKATOR INTENSIF/OUTCOME	WAKTU/TAHUN	TARGET DAN PENGHARGAIAN TAHUN										REK
			2024		2025		2026		2027		2028		
			TARGET	PAWU	TARGET	PAWU	TARGET	PAWU	TARGET	PAWU	TARGET	PAWU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan : Fasilitas Pelatihan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang berakreditasi jumlahnya sampai 500 dan lebih				10 lembaga	10.800.000	10 lembaga	10.800.000	10 lembaga	10.000.000	10 lembaga	10.000.000	
Sub Kegiatan : Pelatihan Peningkatan Kompetensi Asesor (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi Asesor (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif				30 orang	10.800.000	30 orang	10.800.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	
Sub Kegiatan : Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assessor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assessor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif				30 orang	10.800.000	30 orang	10.800.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	
Sub Kegiatan : Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Porsi Subsektor Lainnya Kreatif	Jumlah Orang yang Menerima Sertifikasi Kompetensi Subsektor Lainnya Kreatif				30 orang	10.800.000	30 orang	10.800.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	
Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Paralelsite dan Lainnya Kreatif	Persentase Pengembangan Kapasitas SUB Paralelsite dan Lainnya Kreatif				100%	10.800.000	100%	10.800.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	
Sub Kegiatan: Fasilitas dan Pembinaan bagi GAP dalam Paralelsite dan Lainnya Kreatif	Jumlah Laporan Fasilitas dan Pembinaan bagi GAP Dalam Paralelsite dan Lainnya Kreatif bagi GAP Yang Klasifikasi				30 orang	10.800.000	30 orang	10.800.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	
BIKANG DISUSAN SURKELARAI PROGRAM PEMULANG BIKSIAN PERSENTANAN DALAM KADINATINOTA	Persentase persentase keberhasilan pelaksanaan perantara	100%	100%	21.000.000.000	100%	21.000.000.000	100%	21.480.000.000	100%	21.000.000.000	100%	20.040.000.000	
Kegiatan : Pemantauan, Pengawasan, dan Fasilitas Kajian Peningkat Daerah	Persentase Pemantauan, Pengawasan, dan Fasilitas Kajian Peningkat Daerah	100%	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	190.000.000	
Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Pemantauan Peningkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemantauan Peningkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen BKA-SKPD	Jumlah Dokumen BKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen BKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	11.500.000	2 dokumen	11.500.000	2 dokumen	11.500.000	2 dokumen	11.500.000	2 dokumen	11.500.000	

URUTAN DESKSI PROGRAM/KELOMPOK/KEWILAYAHAN KAWILKOT-GATTA DISTRIK	REKORD/ON OUTCOME/DISTRIK	BASELINE 2014	TARGET DAN PENCAPAIAN KAWILKOT-GATTA DISTRIK										REKORD/ON
			2015		2017		2018		2019		2020		
			TARGET	PENCAP	TARGET	PENCAP	TARGET	PENCAP	TARGET	PENCAP	TARGET	PENCAP	
NO	RU	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI	RI
Sub Register : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	10.460.000	2 dokumen	10.460.000	2 dokumen	10.460.000	2 dokumen	10.460.000	2 dokumen	10.460.000	
Sub Register : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	13.527.800	2 dokumen	13.527.800	2 dokumen	13.527.800	2 dokumen	13.527.800	2 dokumen	13.527.800	
Sub Register : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	18.765.000	2 dokumen	18.765.000	2 dokumen	18.765.000	2 dokumen	18.765.000	2 dokumen	18.765.000	
Sub Register : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Daerah (SKPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Daerah SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Daerah Rincin SKPD	12 laporan	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	14.000.450	12 laporan	14.000.450	12 laporan	10.000.450	
Sub Register : Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perangkat Daerah Perangkat Daerah	10 laporan	10 laporan	34.108.000	10 laporan	34.108.000	10 laporan	34.108.000	10 laporan	34.108.000	10 laporan	34.108.000	
Register : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Akuntansi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.250	100%	10.000.000.250	100%	10.000.000.000	100%	10.000.000.000	
Sub Register : Penyusunan Daftar Tanggapan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Daftar Tanggapan ASN	08 orang	08 orang	9.024.020.000	10 orang	9.024.020.250	10 orang	9.024.020.250	10 orang	10.000.000.000	10 orang	10.000.000.000	
Sub Register : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengapian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengapian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	40.000.000	2 dokumen	40.000.000	2 dokumen	20.000.000	
Sub Register : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen	2 dokumen	15.500.000	2 dokumen	15.500.000	2 dokumen	15.500.000	2 dokumen	15.500.000	2 dokumen	15.500.000	
Sub Register : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	15.200.000	2 laporan	15.200.000	2 laporan	15.200.000	2 laporan	15.200.000	2 laporan	11.200.000	
Sub Register : Pengelolaan dan Penyajian Rincin Tanggapan Penatausahaan	Jumlah Dokumen Rincin Tanggapan Penatausahaan dan Tidak Lengkap Penatausahaan	2 dokumen	2 dokumen	11.540.000	2 dokumen	11.540.000	2 dokumen	11.540.000	2 dokumen	11.540.000	2 dokumen	11.540.000	

REKAM LUNAS PROGRAM/KELOMPOK/LOKASI KIRI/DEKAT/DEKAT/DEKAT	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	REKAM LUNAS	TARGET DAN PENCAPAIAN TAHUN										No.1
			2021		2022		2023		2024		2025		
			TARGET	PAJAL	TARGET	PAJAL	TARGET	PAJAL	TARGET	PAJAL	TARGET	PAJAL	
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Sub Regulasi: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SAPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SAPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SAPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SAPD	2 laporan	2 laporan	12.145.000	2 laporan	12.145.000	2 laporan	12.145.000	2 laporan	12.145.000	2 laporan	12.145.000	
Sub Regulasi: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program, Rencana Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program, Rencana Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	14.350.000	2 dokumen	14.350.000	2 dokumen	14.350.000	2 dokumen	14.350.000	2 dokumen	14.350.000	
Regulasi: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	2.088.874.000	100%	2.088.874.000	100%	2.088.874.000	100%	2.088.874.000	100%	2.088.874.000	
Sub Regulasi: Pengamanan Barang Milik Daerah/ SAPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah/ SAPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.032.000.000	1 Dokumen	2.032.000.000	1 Dokumen	2.032.000.000	1 Dokumen	2.032.000.000	1 Dokumen	2.032.000.000	
Sub Regulasi: Koordinasi dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah/ SAPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah/ SAPD	2 laporan	2 laporan	11.400.000	2 laporan	11.400.000	2 laporan	11.400.000	2 laporan	11.400.000	2 laporan	11.400.000	
Sub Regulasi: Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah/ SAPD/ SAPD	Jumlah Laporan Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah/ SAPD/ SAPD	2 laporan	2 laporan	11.000.000	2 laporan	11.000.000	2 laporan	11.000.000	2 laporan	11.000.000	2 laporan	11.000.000	
Sub Regulasi: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SAPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SAPD	2 laporan	2 laporan	11.340.000	2 laporan	11.340.000	2 laporan	11.340.000	2 laporan	11.340.000	2 laporan	11.340.000	
Sub Regulasi: Pendaftaran Barang Milik Daerah pada SAPD	Jumlah Laporan Pendaftaran Barang Milik Daerah pada SAPD	2 laporan	2 laporan	11.540.000	2 laporan	11.540.000	2 laporan	11.540.000	2 laporan	11.540.000	2 laporan	11.540.000	
Sub Regulasi: Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah/ SAPD/ SAPD	Jumlah Laporan Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah/ SAPD/ SAPD	2 dokumen	2 dokumen	11.070.000	2 dokumen	11.070.000	2 dokumen	11.070.000	2 dokumen	11.070.000	2 dokumen	11.070.000	
Regulasi: Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	100%	100%	288.546.737	100%	288.546.737	100%	288.546.737	100%	288.546.737	100%	288.546.737	
Sub Regulasi: Pengawasan Pasca Alokasi untuk Alokasi	Jumlah Pasca Alokasi untuk Alokasi	30 paket	30 paket	64.916.437	30 paket	64.916.437	30 paket	64.916.437	30 paket	64.916.437	30 paket	64.916.437	
Sub Regulasi: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pemerintah	Jumlah Pegawai Pemerintah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	1 orang	16.798.000	1 orang	16.798.000	1 orang	16.798.000	1 orang	16.798.000	1 orang	16.798.000	
Sub Regulasi: Sosialisasi Peraturan Pemerintah/Undang-undang	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Pemerintah/Undang-undang	12 orang	12 orang	11.007.000	12 orang	11.007.000	12 orang	11.007.000	12 orang	11.007.000	12 orang	11.007.000	
Sub Regulasi: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pemerintah/Undang-undang	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pemerintah/Undang-undang	12 orang	12 orang	21.032.300	12 orang	21.032.300	12 orang	21.032.300	12 orang	21.032.300	12 orang	21.032.300	

INDUKSI URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KELOMPOK PENGANGGARAN (GATAS/LOKASI)	INDUKSI URAIAN/LOKASI/KELOMPOK	SARING 2024	TARGET DAN PENCAPAIAN TAHUN										REK
			2023		2024		2025		2026		2027		
			TARGET	PAJAU	TARGET	PAJAU	TARGET	PAJAU	TARGET	PAJAU	TARGET	PAJAU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Registri : Administrasi Urusan Peringkat Daerah	Persentase Administrasi Urusan Peringkat Daerah	100%	100%	1.788.717.363	100%	1.788.717.363	100%	1.784.598.454	100%	1.784.598.454	100%	1.588.598.454	
Sub-Registri : Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	20 paket	109.828.410	20 paket	109.828.410	20 paket	109.828.410	20 paket	109.828.410	20 paket	109.828.410	
Sub-Registri : Penyediaan Pasokan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Pasokan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	20 paket	20 paket	117.137.584	20 paket	117.137.584	20 paket	117.137.584	20 paket	117.137.584	20 paket	111.137.584	
Sub-Registri : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	20 paket	283.250.000	20 paket	283.250.000	20 paket	283.250.000	20 paket	283.250.000	20 paket	130.250.000	
Sub-Registri : Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	20 paket	20 paket	163.788.240	20 paket	163.788.240	20 paket	163.788.240	20 paket	163.788.240	20 paket	130.788.240	
Sub-Registri : Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan Perantara lainnya	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pasokan Perantara lainnya yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	64.000.000	12 dokumen	64.000.000	12 dokumen	64.000.000	12 dokumen	64.000.000	12 dokumen	54.000.000	
Sub-Registri : Fasilitas Koneksi Teras	Jumlah Laporan Fasilitas Koneksi Teras	12 laporan	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	10.000.000	
Sub-Registri : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 laporan	300 laporan	871.588.700	300 laporan	871.588.700	300 laporan	871.588.700	300 laporan	871.588.700	300 laporan	871.588.700	
Sub-Registri : Penerapan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Penerapan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	133.766.400	12 Dokumen	133.766.400	12 Dokumen	130.000.000	12 Dokumen	130.000.000	12 Dokumen	100.000.000	
Registri : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	875.758.168	100%	875.758.168	100%	847.516.088	100%	847.516.088	100%	704.198.088	
Sub-Registri : Pengadaan Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	3 unit	28.884.180	3 unit	28.884.180	3 unit	18.750.000	3 unit	18.750.000	3 unit	128.750.000	
Sub-Registri : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	2 unit	145.000.000	2 unit	145.000.000	2 unit	125.000.000	2 unit	125.000.000	2 unit	115.000.000	
Sub-Registri : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	5 paket	132.876.000	5 paket	132.876.000	5 paket	132.876.000	5 paket	132.876.000	5 paket	89.876.000	
Sub-Registri : Pengadaan Pasokan dan Mebel Lainnya	Jumlah Unit Pasokan dan Mebel Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	47.880.000	3 unit	47.880.000	3 unit	40.880.000	3 unit	40.880.000	3 unit	30.880.000	
Sub-Registri : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	185.000.000	1 unit	185.000.000	1 unit	180.000.000	1 unit	180.000.000	1 unit	180.000.000	

JENIS LEMBAR PENGAMBILAN (REVENUE RECEIPT)	KETERANGAN (REVENUE RECEIPT)	SALINAN (2018)	TARGET DAN PENCAPAIAN TAHUN										REMARKS
			2018		2017		2016		2015		2014		
			TARGET (Rp)	ACTUAL (Rp)	TARGET (Rp)	ACTUAL (Rp)	TARGET (Rp)	ACTUAL (Rp)	TARGET (Rp)	ACTUAL (Rp)	TARGET (Rp)	ACTUAL (Rp)	
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Peningkatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Dinas Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Dinas Pemerintahan Daerah	100%	100%	588.253.418	100%	588.253.418	100%	588.253.418	100%	588.253.418	100%	588.253.418	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Rupa Rupa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Rupa Rupa	12 laporan	12 laporan	85.200.250	12 laporan	85.200.250	12 laporan	85.200.250	12 laporan	85.200.250	12 laporan	85.200.250	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Rutin dan Tidak Rutin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Rutin dan Tidak Rutin yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	488.700.000	12 laporan	488.700.000	12 laporan	488.700.000	12 laporan	488.700.000	12 laporan	488.700.000	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	35.987.000	12 laporan	35.987.000	12 laporan	35.987.000	12 laporan	35.987.000	12 laporan	35.987.000	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	177.360.168	12 laporan	177.360.168	12 laporan	177.360.168	12 laporan	177.360.168	12 laporan	177.360.168	
Kegiatan : Pemeliharaan Ruang Muka Depan Penunjang Dinas Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Pemeliharaan Ruang Muka Depan Penunjang Dinas Pemerintahan Daerah	100%	100%	5.740.791.318	100%	5.740.791.318	100%	5.740.791.318	100%	5.740.791.318	100%	5.740.791.318	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ruang Pemeliharaan, dan Pagar Kandang Pemeliharaan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ruang Pemeliharaan, dan Pagar Kandang Pemeliharaan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan yang Disediakan	10 unit	10 unit	588.580.000	10 unit	588.580.000	10 unit	588.580.000	10 unit	588.580.000	10 unit	588.580.000	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ruang Pemeliharaan, Pagar dan Perawatan Kandang Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ruang Pemeliharaan, Pagar dan Perawatan Kandang Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 unit	10 unit	114.880.000	10 unit	114.880.000	10 unit	114.880.000	10 unit	114.880.000	10 unit	114.880.000	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Meubel	Jumlah Meubel yang Disediakan	10 unit	10 unit	140.980.000	10 unit	140.980.000	10 unit	140.980.000	10 unit	140.980.000	10 unit	140.980.000	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Meubel Lainnya	Jumlah Peralatan dan Meubel Lainnya yang Disediakan	5 unit	5 unit	124.980.000	5 unit	124.980.000	5 unit	124.980.000	5 unit	124.980.000	5 unit	124.980.000	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	4.617.984.228	2 unit	4.617.984.228	2 unit	4.617.984.228	2 unit	4.617.984.228	2 unit	4.617.984.228	

URAIAN TANTANGAN PROGRAM/KELOMPOK/ORGANISASI MUSKAWA/DAERAH/KELOMPOK	INDIKATOR OUTPUT/COMMODITY	MASALAH 2019	TARGET DAN PADJINDHATY TAHUN										EST.
			2020		2021		2022		2023		2024		
			TARGET	PADJ	TARGET	PADJ	TARGET	PADJ	TARGET	PADJ	TARGET	PADJ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sub Kegiatan : Perawatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	216.880.000	1 unit	216.880.000	1 unit	216.880.000	1 unit	216.880.000	1 unit	216.880.000	
Sub Kegiatan : Perawatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	140.580.000	1 unit	140.580.000	1 unit	130.000.000	1 unit	130.000.000	1 unit	130.000.000	
Sub Kegiatan : Perawatan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Perbaikan/Rehabilitasi	1 ha	1 ha	85.438.360	1 ha	85.438.360	1 ha	45.440.000	1 ha	45.440.000	1 ha	35.365.000	

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemasaran pariwisata	Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Sub Kegiatan : Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
			Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
			Sub Kegiatan : Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya daya saing pemuda	Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
			Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi olah Satuan Pendidikan Dasar	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pekan Paralimpih Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpih Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	
			Sub Kegiatan : Kelulusan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
			Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			Sub Kegiatan : Seleksi Atlet Daerah	
			Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
			Sub Kegiatan : Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
			Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
			Sub Kegiatan : pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	
			Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
			Sub Kegiatan : Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
			Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
			Sub Kegiatan : Pengembangan Olahraga Wisata, Tentangan dan Pelusangan	
			Sub Kegiatan : Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
			Sub Kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	
			Sub Kegiatan : Pemassakan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya kemajuan budaya melayu	Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan, Kebudayaan	
			Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			Sub Kegiatan : Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	
			Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	
			Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
			Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
			Kegiatan : Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
			Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	
4	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya kemajuan budaya melayu	Kegiatan : Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PAD Perwisata	%	4,24	4,27	4,28	4,92	5,10	5,15	
2	Jumlah warisan budaya	Angka	87	88	89	90	91	92	
3	Persentase Wirausaha Muda	%	0,0003	0,0003	0,0004	0,0004	0,0005	0,0006	
4	Jumlah Atlet masuk pelatnas	Angka	12	1	1	1	1	1	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76	77	77	78	79	81	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	%	11,2	11,4	11,5	11,5	11,6	11,8	
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara	%	15,2	15,7	16,2	16,4	16,5	16,7	
3	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Parwisata	%	16,2	16,3	16,5	16,7	16,8	17,2	
4	persentase produk ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	16,8	16,9	16,2	16,3	16,4	16,5	
5	Persentase Pelaku Parwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	78	78,2	78,5	79,7	80,2	91,3	
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1	1	1	2	3	4	
7	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	60	60	60	60	60	70	
8	Peningkatan Prestasi Olahraga	Peringkat	10 Besar	10 Besar	10 Besar	10 Besar	10 Besar	10 Besar	
9	Persentase Partisipasi Pemuda dalam kepramukaan	%	70	70	70	70	70	80	
10	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	%	70	70	70	70	70	70	
11	Persentase Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan	%	70	70	70	70	70	70	
12	Jumlah Sejarah lokal yang didokumentasikan	unit	5	5	5	10	10	10	
13	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	70	70	70	70	70	70	
14	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	%	70	70	70	70	70	70	
15	Persentase Koleksi Cagar Budaya Benda yang dilindungi	%	70	70	70	70	70	70	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman operasional selama lima tahun ke depan. Renstra disusun untuk memastikan bahwa setiap Perangkat Daerah dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki fungsi utama dalam urusan Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis memegang peranan strategis dalam meningkatkan perekonomian terkhusus bidang Pariwisata. Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran langsung dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD, dengan memperhatikan dinamika internal organisasi dan tantangan eksternal yang terus berkembang. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini diarahkan untuk menjadi instrumen yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan dalam mendukung tata kelola pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel. Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tidak hanya sekedar daftar pernyataan niat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat bergantung pada komitmen dan sinergi seluruh aparatur Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan pembangunan di tingkat lokal.

Oleh karena itu, pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029 harus dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan terukur, serta dilandasi oleh prinsip kolaboratif dan berorientasi pada kinerja. Evaluasi berkala terhadap implementasi Renstra juga menjadi bagian tak terpisahkan untuk memastikan bahwa setiap langkah strategis senantiasa relevan dan tepat sasaran, serta dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Diharapkan pada periode perencanaan berikutnya, kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat semakin meningkat, baik dari sisi substansi maupun pelaksanaannya. Dengan demikian, seluruh perangkat daerah dapat

bekerja secara lebih terarah, terukur, dan sinergis dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkalis lima tahun ke depan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

a. Konsistensi Implementasi

Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dilaksanakan secara konsisten dengan menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tanggung Jawab Pelaksanaan

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Renstra, termasuk pelaksanaan evaluasi berkala bersama seluruh bidang di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

c. Evaluasi Berkala

Evaluasi terhadap pencapaian sasaran Renstra dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam periode lima tahun, sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan program.

d. Pelaksanaan Melalui Renja dan DPA Tahunan

Implementasi Renstra dilakukan melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis setiap tahun, yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

e. Pengendalian dan Evaluasi Terintegrasi

Hasil pelaksanaan DPA dievaluasi secara triwulanan dan menjadi bagian integral dalam evaluasi pelaksanaan RKPD serta digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

f. Revisi Renstra Berdasarkan Evaluasi

Jika hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian, maka revisi Renstra dapat dilakukan melalui penyesuaian Renja tahun berjalan atau revisi Renstra secara menyeluruh apabila RPJMD mengalami perubahan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pelibatan Stakeholder Pembangunan

Pelaksanaan Renstra harus mampu mendorong partisipasi aktif para pemangku kepentingan pembangunan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi lintas sektor.

Bengkalis, 30 Desember 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BENGKALIS



EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660514 198811 1 001